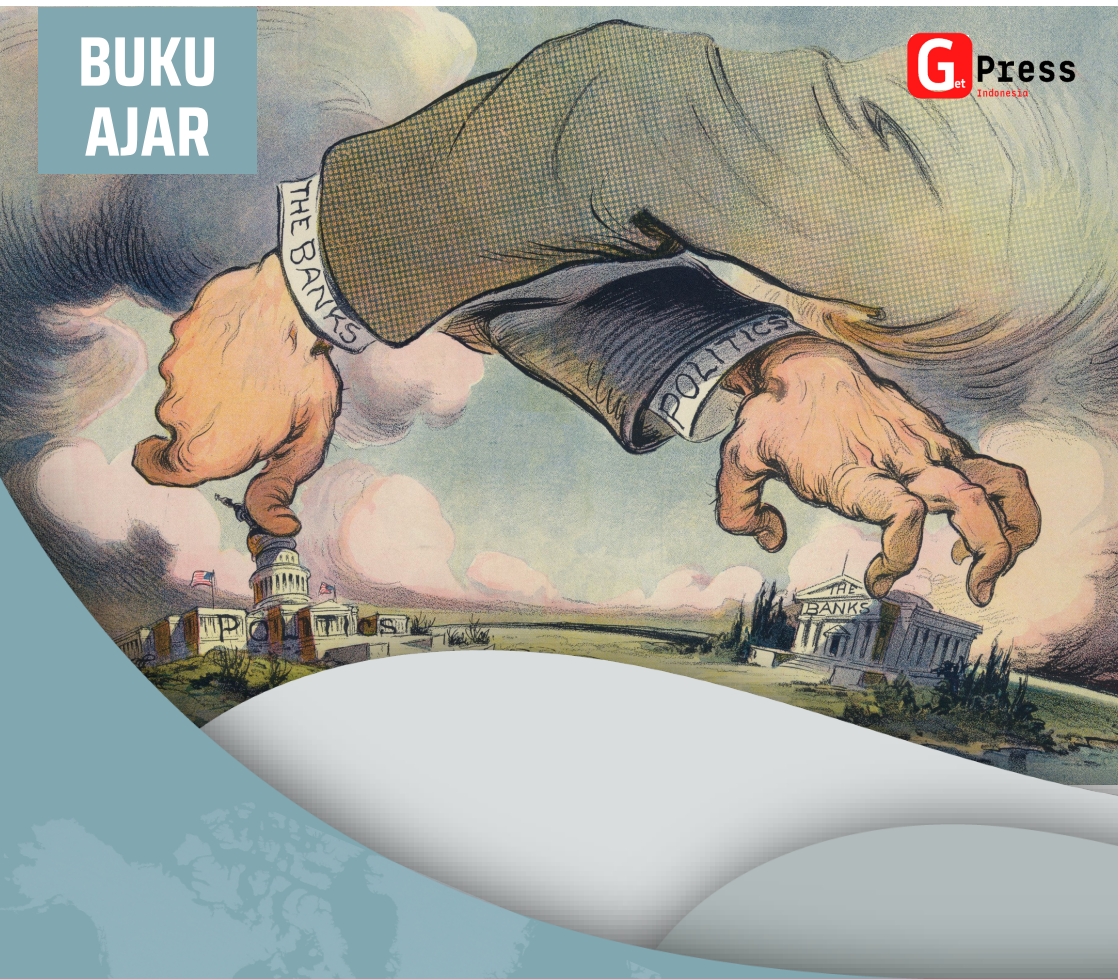


**BUKU  
AJAR**

**G** Press  
Indonesian



# **EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

**ANDI ISMIRA  
RIADY IBNU KHALDUN**



# **BUKU AJAR**

## **EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

**Penulis:**  
**Andi Ismira**  
**Riady Ibnu Khaldun**



**GET PRESS INDONESIA**

**BUKU AJAR**  
**EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

**Penulis :**

Andi Ismira  
Riady Ibnu Khaldun

**ISBN :**

**Editor :** Diana Purnama Sari, M.E.

**Penyunting:** Yuliatr Novita, M.Hum.

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

**Penerbit:** GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

**Redaksi:**

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah  
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat  
website: [www.getpress.co.id](http://www.getpress.co.id)  
email: [adm.getpress@gmail.com](mailto:adm.getpress@gmail.com)

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga proses penyusunan pembuatan Buku Ajar Ekonomi Politik Internasional ini dapat diselesaikan dengan optimal. Buku ajar ini disusun sesuai dengan materi yang telah tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini.

Buku ajar ini memuat ringkasan terkait dengan materi pembelajaran di beberapa pertemuan sesuai dengan apa yang tertuang pada Dokumen RPS yakni Konsep Ekonomi Politik Internasional, Sejarah dan Dinamika Perdagangan Internasional, serta Perusahaan Multinasional dan Investasi Asing. Di samping memuat materi, maka diakhir penjelasan juga tertuang soal latihan untuk membantu mahasiswa/i dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran pada mata kuliah ini. Namun, karena keterbatasan waktu dalam melakukan penulisan, maka materi yang tersedia dalam buku ajar ini masih terbatas pada lima materi. Harapannya pada terbitan selanjutnya akan segera dilengkapi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

Demikian pengantar pada Buku Ajar Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional, diharapkan adanya masukan dan saran agar dapat mendorong kesempurnaan penulisan Buku Ajar ini. Semoga Buku Ajar ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sulawesi Barat.

Majene, 22 Desember 2023

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                            | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                | <b>iii</b> |
| <b>BAB I GAMBARAN UMUM MATA KULIAH</b>                                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Deskripsi Mata Kuliah .....                                                                  | 1          |
| 1.2 Tujuan Pembelajaran.....                                                                     | 2          |
| 1.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....                                                        | 3          |
| 1.4 Sub-Capaian Pembelajaran .....                                                               | 3          |
| <b>BAB II KONSEP DASAR EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL</b>                                         | <b>5</b>   |
| <b>BAB III PENDEKATAN TEORITIK DALAM EKONOMI<br/>POLITIK INTERNASIONAL</b>                       | <b>9</b>   |
| 3.1 Merkantilisme.....                                                                           | 9          |
| 3.2 Merkantilisme, Proteksionisme dan Kepentingan<br>Nasional: Hubungan Saudara Tua .....        | 12         |
| 3.3 Komponen Merkantilisme .....                                                                 | 13         |
| 3.4 Merkantilisme dalam pandangan Thomas Oatley: Suatu<br>Pendekatan <i>State Centered</i> ..... | 14         |
| 3.5 Kekuatan dan Kelemahan Merkantilisme .....                                                   | 16         |
| 3.6 Liberalisme Ekonomi.....                                                                     | 19         |
| 3.7 Ciri-Ciri Dominan Kapitalisme.....                                                           | 22         |
| 3.8 Liberalisme Versus Merkantilisme: Perbandingan .....                                         | 25         |
| 3.9 Transformasi pemikiran liberalisme (Mengenal<br>pemikiran Ricardo, Mill, Keynes, dsb) .....  | 30         |
| 3.10 Kompromi Keynesian: Mendamaikan Negara dan<br>Kepentingan Internasional.....                | 38         |
| 3.11 Pendekatan teori kritis dalam HI .....                                                      | 40         |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.12 Ekonomi Politik Internasional yang Kritis: Pergesaran<br>Posisi Power ..... | 44        |
| 3.13 Struktur Sistem Global (Immanuel Wallerstein) dan<br>Penyebabnya .....      | 46        |
| 3.14 Ekonomi Politik Internasional dalam Pendekatan Neo-<br>Gramscian .....      | 49        |
| <b>BAB IV SEJARAH DAN DINAMIKA PERDAGANGAN<br/>INTERNASIONAL</b>                 | <b>55</b> |
| 4.1 Sejarah Perdagangan Internasional .....                                      | 55        |
| 4.2 Dasar Terjadinya Perdagangan internasional .....                             | 56        |
| 4.3 Teori dalam Perdagangan Internasional .....                                  | 59        |
| <b>BAB V PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN INVESTASI<br/>ASING</b>                    | <b>63</b> |
| 5.1 Perusahaan Multinasional .....                                               | 63        |
| 5.2 Investasi Asing .....                                                        | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                            | <b>70</b> |
| <b>BIODATA PENULIS</b>                                                           | <b>74</b> |





# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM MATA KULIAH**

### **1.1 Deskripsi Mata Kuliah**

Mata kuliah Ekonomi Politik Internasional merupakan bagian wajib dari kurikulum Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa/i pada Semester V dengan kode IHI 1933. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah pada integrasi konsep ekonomi dan politik dalam konteks global. Pembelajaran difokuskan pada interaksi antara berbagai aktor, seperti negara, yang mengendalikan kebijakan terhadap negara lain dalam aktivitas ekonomi internasional, termasuk kerjasama perdagangan dan kemitraan baik secara bilateral maupun multilateral.

Penyelenggaraan mata kuliah ini disesuaikan dengan konten yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mencakup 16 pertemuan dengan dua pertemuan diantaranya untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan untuk mata kuliah ini meliputi: 1) menghargai keberagaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orisinal orang lain; 2) menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya; 3) menguasai dan memahami politik, sosial-budaya, ekonomi, dan keamanan dalam konteks hubungan internasional dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; 4) memahami teori dan isu ekonomi politik internasional, kebijakan pembangunan global; dan 5) analisis mendalam terhadap dinamika ekonomi dan politik internasional. Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan

hibrid, yaitu tatap muka di kelas dan daring melalui aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Whatsapp, dan Telegram.

## **1.2 Tujuan Pembelajaran**

Dengan mendapatkan mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, maka mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami konsep Ekonomi Politik Internasional sebagai bagian dari Hubungan Internasional. Selain itu juga, diharapkan ikutserta dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami sejarah dan dinamika perdagangan internasional, Ekonomi Politik Pembangunan dan Teknologi, Ekonomi Politik Lingkungan Hidup, Bantuan Luar Negeri, Investasi Asing, dan Perusahaan Multinasional, serta berbagai isu-isu di dalam Ekonomi Politik Internasional yang bersifat kontemporer.

Ekonomi Politik Internasional menekankan kepada setiap mahasiswa/i tidak hanya mampu memahami konsep ekonomi dan politik pada skala global secara terpisah, namun juga bagaimana kedua konsep tersebut digabungkan sehingga pemahaman mengenai pengelolaan kebijakan melalui politik dapat memberikan pengaruh terhadap situasi ekonomi khususnya disuatu negara pada skala internasional dalam bentuk interaksi dengan negara lain. Lebih lanjut, adanya aktor lain di luar dari negara juga dianggap memiliki peran yang cukup penting di dalam Ekonomi Politik Internasional juga dikaji di dalam mata kuliah. Adapun yang menjadi fokus perhatian pada mata kuliah ini adalah mengenai isu-isu terbaru tentang ekonomi politik internasional.

## **1.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Untuk lebih jelasnya, terkait dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional adalah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan konsep dan perspektif dalam Ekonomi Politik Internasional (S5, KU1, PP2)
2. Mampu menjelaskan sejarah dan dinamika perdagangan internasional (KU1, PP2, PP4, KK4)
3. Mampu menjelaskan Ekonomi Politik Pembangunan dan Teknologi (KU1, PP2, PP4, KK4)
4. Mampu menjelaskan Ekonomi Politik Lingkungan Hidup (KU1, PP2, PP4, KK4)
5. Mampu menjelaskan Bantuan Luar Negeri, Investasi Asing, dan Perusahaan Multinasional (KU1, PP2, PP4, KK4)
6. Mampu menjelaskan isu-isu di dalam Ekonomi Politik Internasional Kontemporer (KU1, PP2, PP4, KK4)

#### **1.4 Sub-Capaian Pembelajaran**

Untuk lebih jelasnya, terkait dengan Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep Ekonomi Politik Internasional
2. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai Perspektif perspektif dalam EPI: Merkantilisme dan Strukturalisme
3. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai Perspektif EPI: Liberalisme serta Pendekatan Interaksi antara Kepentingan dan Institusi
4. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai Struktur Kekuasaan dan Proses Produksi
5. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai sejarah Perdagangan Internasional
6. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai dinamika Perdagangan Internasional
7. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai Sistem Moneter Internasional
8. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai Ekonomi Politik Pembangunan

9. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan Hutang dan Bantuan Luar Negeri
10. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai Perusahaan Multinasional dan Investasi Asing
11. Mahasiswa memahami dan mampu untuk menjelaskan mengenai Ekonomi Politik Teknologi
12. Mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai Ekonomi Politik Lingkungan Hidup
13. Mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai isu-isu terkait Ekonomi Politik Global kontemporer
14. Mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai isu-isu terkait Ekonomi Politik Global kontemporer

## **BAB II**

# **KONSEP DASAR EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

Berbicara tentang konsep ekonomi politik internasional (EPI) didasari tentang perpaduan antara konsep ekonomi dan konsep politik pada skala global. Ekonomi bertujuan kepada pencapaian kesejahteraan, sedangkan politik berbicara tentang kebijakan, sehingga ekonomi politik adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat tercapai melalui kebijakan yang tepat oleh suatu negara pada skala global. Kemudian, Beberapa penelitian menyatakan bahwa EPI menghubungkan pertumbuhan negara dan pasar sebagai dua aspek yang tak dapat dipisahkan dalam perkembangannya, menunjukkan keterkaitan erat antara sektor politik yang diwakili oleh negara dan sektor ekonomi yang diwakili oleh pasar. Ekonomi, yang menyangkut pencapaian kekayaan, memiliki perbedaan dengan politik yang lebih berfokus pada pencapaian kekuasaan atau dominasi. Dalam konteks EPI, fokus utama tertuju pada negara dan pasar (Jackson & Sorensen, 2005). Adam Smith mendefinisikan ekonomi politik sebagai cabang ilmu negarawan atau legislator serta panduan untuk mengatur ekonomi nasional (Gilpin, 2001).

Studi interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, negara dan pasar, lingkungan domestik dan internasional, serta pemerintah dan masyarakat merupakan fokus EPI (Mas'oed, 2003). Penting untuk memahami juga bahwa EPI bentuk interaksi antara kepentingan ekonomi, nasional, dan proses politik internasional dapat membentuk atau mempengaruhi kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah. EPI tidak hanya melihat negara sebagai aktor tunggal, namun juga terdapat beberapa aktor lainnya seperti organisasi internasional yang berperan dalam regulasi kebijakan ekonomi pemerintah (Oatley, 2018).

EPI menekankan interaksi antara pasar dan aktor politik di dalamnya. Studi ekonomi sendiri tidak mencukupi untuk menjelaskan isu-isu krusial dalam distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi internasional. Ini melibatkan dampak ekonomi global terhadap kepentingan nasional dan efektivitas rezim internasional. Semua ini harus dipahami melalui batasan politik

negara yang mencerminkan kebijakan ekonomi satu negara terhadap yang lainnya. Dalam EPI, konflik terjadi antara interdependensi ekonomi internasional dan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politik. Menurut Oatley (2018), studi EPI memfokuskan pada interaksi antara kepentingan ekonomi dan proses politik yang membentuk kebijakan pemerintah di mana terdapat empat isu utama dalam fokus tersebut, yakni: a) isu sistem perdagangan internasional menitikberatkan pada bagaimana persaingan politik antara entitas yang memiliki kekuatan dan yang kurang berdaya membentuk kerangka perdagangan global; b) dalam isu sistem moneter internasional yakni perhatian difokuskan pada cara persaingan politik antara pihak yang kuat dan yang lemah membentuk sistem moneter internasional, memberikan keleluasaan transaksi ekonomi di antara berbagai negara; c) terkait dengan perusahaan multinasional di mana analisis berfokus pada bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah dalam upaya pemerintah untuk mengatur aktivitas perusahaan tersebut; dan d) isu pembangunan ekonomi mengeksplorasi strategi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan negara berkembang dan menjelaskan variasi dalam pendekatan ekonomi tersebut.

Selanjutnya, EPI juga mengkaji terkait dengan dinamika kehidupan dalam ekonomi global, terutama pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah di pasar ekonomi global. Pertarungan ini menciptakan konsekuensi distributif dalam ekonomi global dan menyebabkan persaingan politik di tingkat nasional dan internasional. EPI melibatkan interaksi antara pasar dan aktor-aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional, serta mempelajari bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk evolusi ekonomi global (Oatley, 2018).

## **SOAL LATIHAN**

1. Apakah yang dimaksud dengan EPI?

2. Jelaskan keterkaitan di antara para aktor baik negara, perusahaan multinasional, maupun organisasi internasional dalam EPI?
3. Jelaskan yang dimaksud dengan perdagangan internasional?
4. Apabila EPI mengkaji terkait dengan kebijakan negara di dalam aktivitas ekonomi global? Berikan satu contoh kemudian jelaskan terkait dengan yang dimaksud.

# **BAB III**

## **PENDEKATAN TEORITIK DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

### **3.1 Merkantilisme**

Dalam bidang ekonomi politik, setiap pemerintahan di suatu negara akan menentukan kebijakan ekonomi tertentu yang menjadi rah landasan pembangunan mereka. Demikian pula bagaimana strategi dan pendekatan kebijakan ekonomi politik yang dipilih oleh suatu negara. Merkantilisme, filosofi ekonomi yang pertama kali muncul pada abad ke-16, percaya bahwa tujuan utama negara adalah untuk memaksimalkan kekayaan, dan melihat ekonomi sebagai faktor utama dalam mencapai tujuan tersebut. Beberapa politisi dan ekonom terkenal mendukung komunisme. Salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, Alexander Hamilton, sangat mendukung merkantilisme dalam bentuk kebijakan proteksionis yang bertujuan untuk meningkatkan industri domestik negara (Masruroh, 2017). Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk melihat kembali ke tiga aliran pemikiran ekonomi politik: Marxisme, Liberalisme, dan Merkantilisme. Sebenarnya, Wolin (2004) menyatakan bahwa masing-masing dari tiga cabang pemikiran ini memberikan jawaban unik untuk pertanyaan di atas. Saat mereka masing-masing dibandingkan dan dipertimbangkan, perbedaan ini telah menjadi subjek perdebatan. Ada dua perspektif yang bertentangan tentang Liberalisme dan Merkantilisme.

Dari perspektif sejarah, menurut (Gilpin, 2008), merkantilisme dianggap sebagai teori yang paling kuno dan signifikan dalam ekonomi internasional, karena memberikan dasar konsep "paksaan" yang diterapkan di seluruh negara-bangsa. Perkembangan klasik merkantilisme terkait erat dengan munculnya negara-bangsa modern di Eropa pada abad ke-15

hingga ke-18. Pada periode ini, konsep intervensi negara di pasar untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan nasional mendominasi pandangan ekonomi politik. Sebagai hasil dari pengalaman belajar dari sejarah perang Eropa dan persaingan antara kekuatan Eropa untuk mencapai supremasi yang dipersepsikan oleh masyarakat, para ekonom pada periode tersebut mengutamakan wilayah sebagai prioritas utama negara dengan argumen bahwa melindungi keamanan dan otonomi nasional memerlukan penciptaan dan pemeliharaan kekayaan serta kekuasaan. Sesuai dengan pandangan merkantilis, keyakinan mendasar adalah bahwa negara-bangsa hanya dapat mencapai kekayaan dan kekuasaan melalui kemampuan militer dan ekonomi yang efisien, yang diperlukan untuk melindungi diri dari campur tangan pihak asing.

Kebijakan kompetitif terhadap pengembangan teknologi, perdagangan dan perdagangan dan akuisisi bahan baku untuk manufaktur terkadang tidak terdefinisi dengan baik dan tidak menentu, namun hal tersebut merupakan kebijakan yang sangat nyata di antara negara-negara Eropa dimulai pada awal 1500-an dan berlangsung selama berabad-abad (Ballinger, 2011). Tahun tersebut adalah tahun-tahun dimana merkantilisme bertumbuh pesat di Eropa. Kebijakan-kebijakan ini secara luas dapat digambarkan sebagai (atau dikatakan sebagai) merkantilisme (dan kolonialisme dan kameralisme dalam tradisi Perancis dan Jerman, yang juga akan sangat mempengaruhi Jepang, AS, dan negara-negara lain);

Schmoller menggambarkan sistem merkantilisme sebagai berikut: "Esensi sistem ini tidak terletak pada doktrin uang, atau neraca perdagangan; bukan pada tarif hambatan, bea masuk, atau hukum navigasi; tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih besar: yaitu dalam mengubah secara menyeluruh organisasi dan masyarakatnya, serta negara dan lembaga-lembaganya negara dan organisasinya, dalam mengubah ekonomi lokal dan teritorial menjadi ekonomi internasional (Schmoller 1896, dalam Reinert, 2004).

Pendekatan Merkantilisme hanya mendapat sedikit perhatian di abad ke-20 (Mokyr, 2003). Sebagian besar ulasan

tentang merkantilisme merkantilisme sebagai alat untuk menantang teori-teori lain, dengan banyak kesalahan representasi yang terjadi secara tidak sengaja. Hal ini menyebabkan penerimaan yang luas terhadap pemahaman yang sederhana dan salah tentang merkantilisme. Akibatnya, pemahaman tentang subjek tersebut menjadi lebih rendah. Oleh sebagian besar pemikir dan teoretikus, merkantilisme telah dianggap sebagai filsafat ekonomi politi yang usang. Baik Politik konservatif maupun liberal tampaknya mengabaikan dampak historis merkantilisme. "Hanya ada sedikit contoh yang lebih baik untuk mencoba memberikan koherensi yang menyesatkan untuk masalah-masalah yang kompleks daripada cara merkantilisme telah dianggap sebagai filsafat yang sudah usang," kata Paul Ric). Baik politik konservatif maupun liberal tampaknya mengabaikan dampak historis merkantilisme. Karena dampak historis dari kebijakan-kebijakan ini pada abad ke-20, kelompok kanan dan kiri tampaknya mengabaikan masyarakat modern. Mereka bahkan tampaknya meremehkan mereka. Meskipun mereka mengakui bahwa negara memainkan peran dalam pembangunan, kaum kiri menentang pandangan kapitalis dan "internalis" tentang Eropa sebagai wilayah yang berkembang secara ekonomi sebagian besar karena faktor perkembangan kelembagaan yang digerakkan oleh dinamika perdagangan dan persaingan intra-negara. Sebaliknya, kaum kanan menekankan merkantilisme pada model internalis dari ekspansi Eropa yang "terfragmentasi" dan kompetitif. Oleh karena itu, merkantilisme mendapat sedikit dukungan di abad ke-20.

### **3.2 Merkantilisme, Proteksionisme dan Kepentingan Nasional: Hubungan Saudara Tua**

Proteksionisme dipercayai sebagai kebijakan ekonomi yang berasal dari merkantilisme. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri dalam perdagangan internasional untuk mencegah perekonomian dalam negeri mereka terpengaruh oleh barang impor. Pada dasarnya, pemerintah berusaha memberikan insentif dan perlindungan sebagai perlindungan untuk mendukung kebijakan perdagangan yang dapat membantu para pelaku kriminal di lapangan. Alexander Hamilton (1755–1804), seorang ekonom dan anggota Kongres Amerika Serikat, adalah orang yang paling berpengaruh dalam merencanakan gagasan proteksionisme.

Hamilton menyatakan dalam laporan *Report on Manufactures* (1791) bahwa negara harus berpartisipasi secara aktif dalam membangun sistem produksi yang memungkinkan akumulasi kapitalis dan mengatasi berbagai masalah dalam sistem perdagangan internasional yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Hamilton memberikan sarannya kepada kongres Amerika Serikat (AS), yang mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Negara-negara harus menerapkan tanggung jawab perlindungan (tarif dalam negeri, terutama untuk barang-barang yang dibuat oleh negara-negara pesaing AS),
- b. Negara harus berani menerapkan tindakan pelarangan barang pesaing (misalnya, melarang impor produk dari negara-negara pesaing), dan harus memiliki kemampuan untuk melarang ekspor produk manufaktur. Menghemat uang dan sekaligus membatasi akses negara lain ke segmen produk tertentu adalah tujuan kebijakan ini.
- c. Negara harus memiliki kemampuan untuk melarang ekspor produk manufaktur, atau pelarangan ekspor bahan produksi, terutama di bidang di mana Amerika Serikat dapat memproduksinya dengan harga yang lebih rendah daripada negara lain. Tujuan kebijakan ini adalah untuk

menghemat uang dan sekaligus membatasi akses negara lain ke segmen produk tertentu.

- d. Negara harus menerapkan peraturan hukum yang adil untuk pengecekan komoditas manufaktur. Peraturan ini dibuat untuk memberikan jaminan kualitas produk kepada pelanggan dan mencegah penyelundupan. Menurut peraturan ini, orang yang sengaja menghindari tarif impor dapat dihukum.

### **3.3 Komponen Merkantilisme**

Kekayaan dan kekuasaan dianggap sebagai komponen penting dalam proses membangun negara dan bangsa yang makmur dan aman. Kekayaan dan kekuatan adalah lingkaran yang berputar, dan menghasilkan kekayaan adalah tujuan terakhir untuk meningkatkan kekuatan. Akibatnya, jika sebuah negara tidak dapat melindungi dirinya dari penjajah asing, negara tersebut akan digulingkan dan berakhir dalam kemiskinan dan kelemahan.

Dengan demikian negara harus dalam kondisi ekonomi yang stabil, berlimpah. Untuk menghasilkan negara kaya, kesejahteraan penduduknya juga menjadi prasyarat utama, sehingga dalam pandangan merkantilisme mereka yang tampak miskin, lemah, dan rentan mungkin terlihat aneh dan berbeda. Dari perspektif merkantilis, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor adalah cara penting untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan. Dengan demikian, sistem perdagangan yang menguntungkan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

Merkantilisme meyakini, konsep Selisih antara ekspor dan impor dan jumlah emas yang diperoleh dari perdagangan. Konsep ini ditunjukkan dengan jelas dalam karya-karya merkantilis dari abad ke-16,-17, dan-18. Mark blaug kemudian menulis beberapa fitur penting tentang kebijakan perdagangan merkantilisme yang dapat meningkatkan kesejahteraan nasional, yakni mengumpulkan emas dan menetapkan regulasi perdagangan luar

negeri untuk menghasilkan arus masuk emas sebanyak mungkin dan perak (Keynes J. M., 1991).

Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus mendorong industrinya dengan mengimpor bahan baku murah sambil menerapkan kewajiban protektif atas barang yang dibuat di luar negeri. Ekspor harus ditingkatkan, terutama barang jadi, agar negara dan masyarakatnya tidak terbebani. Penekanan pada pertumbuhan penduduk adalah yang paling penting. Kebijakan di atas membuat monopoli dalam industri manufaktur seperti East India Company pada abad ke-17 dan ke-18 mendapat banyak keuntungan. Selama penjajahan Inggris di India, model perdagangan ini terlihat kembali: East India Company membantu pedagang kaya dan bangsawan dengan menjual barang manufaktur ke koloni dan menerima tenaga kerja murah, emas, perak, bulu, kayu, dan bahan baku.

Satu lagi ciri merkantilisme, adalah negara mengatur semua kegiatan ekonomi. Dengan menekankan kekayaan sebagai elemen kekuatan yang sangat penting, merkantilis berpendapat bahwa kegiatan ekonomi terlalu penting, yang harus dilakukan melalui proses yang menyeluruh untuk menentukan di mana dan bagaimana sumber daya masyarakat berada. Selain itu, analisis dari perspektif merkantilis menunjukkan bahwa "industri pemula" hanya dapat berkembang dalam jangka panjang dengan dukungan pemerintah. Dengan demikian, merkantilis menambahkan bahwa proses yang "tidak terkoordinasi" akan menghasilkan struktur ekonomi yang "tidak tepat" dan bahwa negara harus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi.

### **3.4 Merkantilisme dalam pandangan Thomas Oatley: Suatu Pendekatan *State Centered***

Secara umum, merkantilisme harus dianggap sebagai komitmen untuk membangun negara, dan literaturinya luas dan beragam. Namun, Thomas Oatley mengatakan bahwa merkantilisme pada dasarnya mengikuti tiga gagasan utama:

Pertama, merkantilis klasik berpendapat bahwa kekayaan dan kekuasaan nasional sangat terkait, yang berarti kekayaan adalah sumber utama kekuatan nasional dalam sistem internasional (Oatley dalam Tampubolon *et al*, 2022).

Kedua, kekayaan hanya dapat dihasilkan dari perdagangan, dan satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan perdagangan adalah dengan terus meningkatkan ekspor dan menghindari impor. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah dasar kebijakan negara. Terakhir, beberapa orang telah lama percaya bahwa kegiatan ekonomi tidak memiliki nilai yang sama. Sebagai contoh, merkantilis lama percaya bahwa, dibandingkan dengan sektor pertanian dan non-manufaktur lainnya, penting untuk mendorong industri manufaktur. Akibatnya, kekayaan dan kekuasaan merupakan dasar kebijakan negara. Pada akhirnya, beberapa merkantilis klasik percaya bahwa beberapa kegiatan ekonomi lebih penting daripada yang lain. Merkantilis klasik, misalnya, percaya bahwa manufaktur harus dipromosikan daripada pertanian dan kegiatan non-manufaktur lainnya.

Dalam bukunya, Thomas Oatley menyatakan bahwa pendekatan merkantilisme sangat erat dengan konsep *State-Centered*. Atau sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah. Ini didefinisikan sebagai campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tanpa mempertimbangkan kelompok kepentingan domestik. Jika intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, metode ini lebih berfokus pada intervensi pemerintah yang berusaha mengembangkan industri nasional tertentu. Mereka kemudian akan menemukan bahwa perekonomian meluas dengan mempertahankan proteksionisme (Oatley, 2018).

Pendekatan *State-Centered* bergantung pada dua asumsi dasar: proteksionisme berdampak pada kesejahteraan sosial dan peran pemerintah yang independen dalam membuat kebijakan tanpa tekanan kelompok kepentingan. Menurut kedua asumsi dasar ini, proteksionisme dapat memberikan kesejahteraan

sosial dalam kondisi tertentu. Kemudian, terkait dengan tekanan kelompok kepentingan, proteksionisme dapat memberikan kesejahteraan sosial.

### **3.5 Kekuatan dan Kelemahan Merkantilisme**

Kekuatan utama merkantilisme adalah dominasi negara sebagai alat pembangunan ekonomi dan sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Ekonomi politik "patriotik" ini masih ada di mana-mana di dunia, meskipun banyak orang berpendapat bahwa kerangka perdagangan ekonomi modern telah usang. Masyarakat yang bekerja keras untuk mengatur dan mengelola ekonomi negara menciptakan usaha negara yang kuat (Widodo E. , 2017).

Misalnya, banyak ekonom di negara-negara berkembang menganggap pembangunan nasional dan pembangunan bangsa sebagai penyebab penyesuaian dengan industrialisasi negara-negara Barat lainnya. Oleh karena itu, mereka menghilangkan "industri pemula" mereka di negara-negara industri dewasa lainnya, meskipun mereka mempertimbangkan untuk mendorong industri dalam negeri. Ekonom membandingkan keberhasilan ekonomi Jepang, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan pada 1980-an dan 1990-an dengan Amerika Serikat dan negara-negara industri lainnya.

Pada kasus Jepang Misalnya, ekonom Lester Thurow (ibid) menyatakan bahwa keinginan Jepang untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia mendorong mereka untuk lebih maju daripada negara lain. Sebenarnya, sampai saat ini, negara-negara masih menggunakan merkantilisme dengan tujuan mendapatkan lebih banyak keamanan di dunia yang "tidak dapat diprediksi" ini. Selanjutnya, merkantilisme memberikan dasar ideologi ekonomi politik global yang menekankan pentingnya keamanan dan kepentingan politik. Dengan demikian, merkantilisme memberikan keamanan, atau kekuatan militer, untuk negara, yang dianggap sebagai syarat penting untuk stabilitas

ekonominya dan stabilitas ekonominya dalam struktur negara yang bersaing.

Selain itu, merkantilisme, yang menekankan pentingnya keamanan dan kepentingan politik, memberi negara keamanan, atau kekuatan militer, yang dianggap penting untuk stabilitas ekonomi dan sistem negara yang bersaing. Untuk menunjukkan kekuatan merkantilisme dalam konteks ini, kita harus mempertimbangkan contoh Perusahaan Hindia Timur Belanda. Ini akan menunjukkan bagaimana merkantilisme berhasil dalam operasi ekonomi mereka. Pada awal abad ke-17, Belanda baru saja mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol dan mendirikan Perusahaan Hindia Timur Belanda.

Setelah Portugis membuka jalan laut ke Far East, Inggris dan Belanda menggunakan teknologi kapal mereka untuk berdagang dan menjajah banyak negara. Berbeda dengan banyak perusahaan besar pada masa itu, perusahaan Hindia Timur Belanda memiliki angkatan bersenjata dan angkatan laut sendiri. Perusahaan juga memiliki monopoli untuk mengembangkan bisnis di Asia. Pada tahun 1602, asosiasi pedagang yang disebut Perusahaan Hindia Timur Belanda (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, VOC) bekerja sama untuk membagi risiko, melakukan ekonomi dalam skala yang lebih besar, dan mengurangi persaingan. John (2008) menyatakan bahwa predikat VOC yang kuat dan stabil dalam perdagangan rempah-rempah telah membantu organisasi tersebut membangun dan mempertahankan hubungan pasar. Walaupun mempekerjakan 50.000 karyawan, 30.000 prajurit, dan 200 kapal, termasuk banyak yang dipersenjatai, VOC menjadi perusahaan terkaya di dunia pada tahun 1670 dengan dividen tahunan 40% atas investasi mereka. Kegiatan ekonomi VOC jelas berkembang menjadi perusahaan ekonomi yang paling efisien di antara kelompok dan negara yang kompetitif.

Satu kelemahan kerangka ekonomi merkantilisme adalah kebutuhan biaya yang besar untuk menjalankannya dan potensi

keterlibatan negara dalam konflik dagang begitu besar. Banyak ekonom liberal berpendapat bahwa kerangka ekonomi merkantilisme bersifat konflik karena beberapa negara bersaing untuk industri yang mereka inginkan, yang menyebabkan konflik perdagangan. Salah satu kelemahan merkantilisme adalah bahwa pemerintah menilai kekuatan negara berdasarkan "Zero sum game", yang berarti bahwa negara-negara pesaing harus kalah jika mereka memperoleh. Dalam perspektif ini, konflik dikaitkan dengan investasi, perdagangan, dan hubungan ekonomi. Menurut asumsi ini, dalam konteks seperti itu, negara-negara tidak memiliki hubungan ekonomi internasional yang efektif karena kerja sama akan menguntungkan semua pihak. Teori ini meyakini bahwa negara-negara yang lemah dan rentan akan menjadi lebih bergantung pada negara lain jika ketentuan impor diputuskan (Widodo E. S., 2017).

Semua negara mengejar kekayaan dan kekuasaan, yang menyebabkan konflik dan lingkungan yang tidak bersahabat. Di sini lagi, masalah Perusahaan Hindia Timur Belanda dari abad ke-17 kembali dihadirkan sebagai contoh. Pada abad ke-17, Belanda dan Inggris bersaing dalam perdagangan. Untuk menggantikan posisi dominan Belanda dalam perdagangan internasional, Jean-Baptiste Colbert, menteri keuangan Prancis, merancang kebijakan industri strategis (Tampubolon *et al*, 2022). Untuk meningkatkan armada perdagangan Prancis, Rencana Jean pertama kali menginvestasikan lebih banyak 41 pada industri pembuatan kapal. Dia kemudian menerapkan tarif impor untuk memperkuat industri manufaktur Prancis dan melindunginya dari pesaing dari negara lain.

Bersamaan dengan itu, Perancis memberi sanksi kepada produser produk konvensional juga. Karena tarif impor Prancis meningkat, negara lain juga memberlakukan tarif yang lebih tinggi. Proses ini merupakan komponen konstitusional yang memicu Perang Belanda dari tahun 1672 hingga 1678. Perang Anglo-Belanda pertama antara 1652 dan 1657 juga merupakan perselisihan di laut antara angkatan laut. Sumber konflik antara kedua negara adalah Undang-Undang Navigasi Pertama, yang

ditetapkan pada tahun 1651. Undang-undang tersebut melarang barang impor kecuali barang yang dibawa oleh kapal Inggris. Merkantilisme pada dasarnya mengutamakan kepentingan nasional ketika membuat kebijakan yang menguntungkan pasar domestik dan mengalahkan industri asing. Menurut buku Jonathan Israel "Konflik dan Kekayaan", pedagang Inggris sangat menentang Belanda karena mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pedagang Belanda saat Belanda memperoleh nilai atau pangsa pasar yang lebih besar.

Di bawah keadaan ini, pedagang Inggris membuat banyak traktat untuk memastikan perdagangan internasional, pengiriman, dan sektor lain. Karena konflik dianggap sebagai permainan zero-sum, komersilisme berpendapat bahwa mereka adalah inti dari hubungan ekonomi internasional. Akibatnya, konflik antara negara-negara untuk sumber ekonomi ini sudah lama ada dan tidak dapat dihindari. Tapi latihan militer dan perlombaan senjata sangat mahal. Anggaran akan membengkak dan ekonomi tidak efisien. Selain itu, pengembangan industri yang tidak mempertimbangkan keunggulan komparatif atau kondisi pasar dapat berdampak negatif pada ekonomi masyarakat. Adam Smith mengatakan bahwa menentukan industri yang kuat bahkan dapat membahayakan ekonomi negara (Widodo, *ibid*).

### **3.6 Liberalisme Ekonomi**

Liberalisme adalah sebuah pendekatan dalam ekonomi politik internasional (IPE). Dalam berbagai konteks, liberalisme ini memiliki arti yang berbeda, konsepsi yang berbeda. Misalnya, seorang liberal biasanya dianggap sebagai orang yang percaya pada peran aktif negara dalam masyarakat, seperti membantu orang miskin dan mendanai program untuk mengatasi masalah sosial. Para ekonomi liberal, juga dikenal sebagai neoliberal, juga berpendapat bahwa negara harus memainkan peran dalam mengatas kekacauan yang ditimbulkan akibat terlalu bebasnya sirkulasi ekonomi. Negara dalam pandangan liberalisme

seharusnya menjalan peran ekonomi yang relatif kecil dalam masyarakat (Balam & Dilmann, 2014). Dengan kata lain, orang-orang yang biasanya disebut sebagai "konservatif" di Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan Australia memiliki banyak kesamaan dengan kaum ekonomi liberal modern.

Ada empat tesis utama dalam pembahasan liberalisme ekonomi ini. *Pertama*, gagasan liberalisme ekonomi terus berkembang sebagai cerminan dari perubahan ekonomi dan kekuatan serta pengaruh aktor dan institusi. *Kedua*, liberalisme ekonomi mendapatkan popularitas baru karena hubungannya dengan pemerintahan Reagan dan Thatcher yang *laissez-faire*, yang berpuncak pada kampanye globalisasi pada tahun 1990-an. *Ketiga*, sejak saat itu liberalisme ekonomi ortodoks semakin banyak diserang karena kegagalannya dalam memprediksi atau menangani hal-hal seperti krisis keuangan dan kemiskinan di negara-negara kurang berkembang (LDC). *Keempat* dan terakhir, bahwa meskipun telah melemah, ide dan kebijakan *laissez-faire* kemungkinan besar akan tetap populer di Amerika Serikat dan banyak negara lain.

Perspektif liberal saat ini mengungkapkan banyak wawasan tentang ekonomi politik yangyang dilewatkan atau tidak dibahas oleh kaum merkantilis. Pada dasarnya, istilah luas "liberalisme" berarti "kebebasan di bawah hukum. Liberalisme berfokus pada sisi sifat manusia yang kompetitif dengan cara yang konstruktif dan dipandu oleh akal, bukan emosi. Liberalisme ekonomi klasik berakar pada reaksi terhadap tren penting di Eropa pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas. François Quesnay (1694-1774) memimpin sekelompok filsuf Prancis yang disebut Fisiokrat atau les Économistes menyikapi kentalnya intervensi negara terhadap perekonomian masyarakat.

Quesnay mengutuk campur tangan pemerintah di pasar, dengan menyatakan bahwa, dengandengan beberapa pengecualian, hal itu membawa kerugian bagi masyarakat. Moto kaum Fisiokrat adalah *laissez-faire*, *laissez-passer*, yang berarti

"biarlah, biarlah berlalu," tetapi dengan semangat mengatakan negara, "Lepaskan tanganmu! Biarkan kami sendiri!" Hal ini menjadi dasar dari tema *liberalisme* yang dibangun Adam Smith (1723-1790), seorang pemikir Skotlandia yang lebih kontemporer dari Quesnay yang secara umum dianggap sebagai bapak ekonomi modern.

Smith dan banyak orang setelahnya, termasuk David Ricardo, Friedrich Hayek, dan Milton Friedman, menunjukkan kepercayaan besar terhadap cara kerja pasar, disandingkan dengan tingkat ketidakpuasan yang berbeda terhadap negara, atau setidaknya untuk potensi kesewenang-wenangannya. Dalam bukunya yang terkenal, *The Wealth of Nations*, Smith menentang kaum merkantilis negara abad ke-18, yang didirikan berdasarkan prinsip bahwa negara adalah yang terbaik atau adalah ketika kekuasaan negara digunakan untuk menciptakan kekayaan, yang menghasilkan lebih banyak kekuasaan dan keamanan nasional. Bagi kaum ekonomi liberal klasik, kebebasan individu dalam kerangka pasar merupakan alternatif terbaik dari kekuasaan negara yang berpotensi menyalahgunakan dalam hal alokasi sumber daya atau pengorganisasian ekonomi.

Namun, bagi Smith, istilah "negara" didefinisikan sebagai Parlemen Inggris, yang mewakili kepentingan kaum bangsawan, bukan kepentingan para pengusaha dan warga dari pusat-pusat industri yang sedang berkembang. Baru pada tahun 1830-an Parlemen cukup direformasi untuk mendistribusikan kekuasaan politik secara lebih luas. Sebagai orang Skotlandia tanpa tanah, yang karena itu tidak dapat memberikan suara, Smith memiliki beberapa alasan untuk mempertanyakan struktur kekuasaan pada masanya. Smith juga percaya pada sisi kooperatif dan konstruktif dari sifat manusia. Baginya, kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat dilayani oleh pilihan-pilihan individu (rasional), yang jika diamati dari jauh tampak sebagai tangan tak terlihat yang memandu ekonomi dan mempromosikan kebaikan bersama. Ia menulis:

Pada umumnya, warga negara biasa tidak berniat untuk mendukung kepentingan umum, dan dia tidak tahu seberapa banyak dia melakukannya. Dengan memilih untuk mendapatkan dukungan dari industri domestik daripada industri asing, ia hanya menginginkan keamanannya sendiri; dan dengan mengarahkan industri sedemikian rupa sehingga produknya sendiri dapat terbesar, ia hanya menginginkan keuntungannya sendiri. Dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lainnya, ia diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat untuk mendukung tujuan yang tidak jelas (ibid).

Smith menulis karyanya pada masa dimana feodalisme digantikan oleh sistem produksi yang disebut kapitalisme. Dia adalah orang pertama yang menulis secara menyeluruh tentang kapitalisme dalam buku *The Wealth of Nations*, yang diterbitkan pada tahun 1776. Ini adalah ringkasan singkat dari beberapa prinsip dan prinsip kapitalisme yang sebagian besar didasarkan pada Smith tau, setidaknya, cara banyak kaum ekonomi liberal (OEL dan HIL) menafsirkan karyanya saat ini.

### **3.7 Ciri-Ciri Dominan Kapitalisme**

Dalam ekonomi kapitalis, kepentingan pribadi mendorong individu untuk membuat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Akan tetapi, persainganlah yang membatasi dan mendisiplinkan kepentingan pribadi dan mencegahnya menjadi destruktif bagi kepentingan orang lain. Dalam kondisi ideal, produsen harus bersaing dengan yang lain, yang memaksa mereka untuk mengenakan harga yang wajar dan memberikan kualitas yang wajar dan memberikan barang yang berkualitas kepada pelanggan mereka, atau kehilangan bisnis mereka. Konsumen juga menghadapi persaingan dari konsumen lain yang mungkin bersedia membayar lebih mahal untuk suatu produk. Bahkan jika produsen mungkin ingin menaikkan harga tinggi untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka yang sempit, dan pembeli mungkin ingin menekan harga rendah untuk alasan yang sama, kekuatan persaingan menjaga agar pengejaran

kepentingan pribadi tidak menjadi ekstrem. Terdapat Lima elemen utama kapitalisme yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasar mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Pasar yang luas ada untuk pertukaran tanah, tenaga kerja, komoditas, dan Uang
3. Persaingan mengatur kegiatan ekonomi; kepentingan pribadi konsumen memotivasi kegiatan ekonomi.
4. Kebebasan berusaha; setiap orang bebas mendirikan perusahaan baru tanpa izin negara.
5. Hak milik pribadi; pemilik sumber daya secara hukum berhak atas pendapatan yang mengalir dari sumber daya tersebut.

Kebebasan berusaha memungkinkan para wirausahawan untuk menguji ide-ide baru di pasar. Dalam dunia yang dinamis dengan selera dan preferensi yang berubah, ketersediaan sumber daya dan teknologi baru mendorong inovasi produk dan proses produksi. Dalam lingkungan seperti itu, pengusaha harus dengan cepat mengarahkan sumber daya mereka dengan cepat untuk mengubah keadaan ketika peluang baru muncul. Kebebasan perusahaan juga memungkinkan perusahaan untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja sesuai kebutuhan. Karena perusahaan dapat dengan mudah memperluas dan mengurangi tenaga kerja, risiko perubahan yang terkait diminimalkan, dan persaingan pun meningkat.

Apa yang paling dikenal dari pemikiran Adam Smith, kemudian, adalah pandangan bahwa idealnya seorang kapitalis memotivasi diri sendiri, mengkoordinasi diri sendiri, dan mengatur diri sendiri. Konsumen menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan; kepentingan pribadi memotivasi pengusaha perusahaan dan pekerjanya untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan konsumen; pasar mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dengan mengkomunikasikan selera dan preferensi konsumen yang terus berubah kepada produsen; dan persaingan memastikan bahwa

pengejaran kepentingan pribadi melayani kepentingan sosial (konsumen)

Adam Smith, menurut Eisenbrauns (2007; dalam Widodo, 2017), percaya bahwa intervensi dan manajemen ekonomi pemerintah tidak dapat dipercaya dan berbahaya: "Negara, harus berusaha mengarahkan para pejabatnya, para SDMnya dengan cara apapun, mereka harus menggunakan kekuasaan Negara untuk memfasilitasi rakyatnya, tidak hanya akan membuat dirinya (Negara dan para pejabatnya) meminta perhatian yang paling tidak perlu." Negara seharusnya seperti seorang ibu yang memiliki kesabaran agar anak-anaknya cukup terlatih dalam menghadapi berbagai jenis persaingan. Otoritas Negara tidak boleh diberikan hanya kepada satu individu, tetapi juga kepada kelompok yang memiliki wewenang yang diduga dapat membahayakan rakyatnya.

Liberalisme ekonomi di sisi lain adalah keyakinan ideologis dalam mengatur ekonomi pada garis individualis, yang berarti bahwa jumlah terbesar dari keputusan ekonomi yang dibuat oleh individu dan bukan oleh kolektif kolektif dan bukan oleh institusi atau organisasi (Adumuah, 2017). Perbedaan-perbedaan ini telah menjadi bahan perdebatan ketika mereka dibawa ke dalam perbandingan. Khususnya, ketika membandingkan antara Liberalisme dan Merkantilisme, ada sudut pandang yang bertentangan Dasar liberalisme modern menekankan nilai-nilai kebebasan dan menganggap bahwa sifat hubungan ekonomi internasional didasarkan pada harmonisasi. Ini sangat berbeda dengan merkantilisme, di mana inti dari hubungan ekonomi adalah bertentangan dan bersaing. Kalah atau menang adalah hukumannya. Tidak seperti pendahulunya, Smith berpendapat bahwa dunia kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui liberalisme, di mana hubungan ekonomi internasional adalah "permainan dengan sejumlah pemikiran positif", yang berarti bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan setelah bisnis dimulai.

### 3.8 Liberalisme Versus Merkantilisme: Perbandingan

Dalam konteks pendekatan ekonomi politik, ada banyak perspektif yang bertentangan, terutama dalam hal perbandingan antara Liberalisme dan Merkantilisme. Di satu sisi, Merkantilisme adalah ideologi ekonomi politik yang kemudian diadopsi oleh Liberalisme pada akhir abad ke-18. Di sisi lain, Merkantilisme adalah abad ke-18. Sebaliknya, teori Merkantilisme masih digunakan hingga hari ini (Ibid).

- a) Pertama, merkantilisme melihat dunia internasional sebagai sesuatu yang kacau dan anarkis. Di sisi lain, liberalisme ekonomi melihat dunia internasional sebagai sesuatu yang teratur dan korporatif. Karena ada banyak aktor, seperti LSM, negara, dan individu, mereka menganggap ini bersifat kooperatif. Menurut kaum merkantilis, karena kekayaan dan kekuasaan suatu negara ditentukan Dengan demikian, pemerintah akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak logam mulia (lebih disukai emas dan perak) sambil mempertahankan apa yang sudah mereka miliki. Agar mereka dapat memperoleh lebih banyak kekayaan, mereka membutuhkan keseimbangan perdagangan yang menguntungkan, yaitu mengekspor lebih banyak dan mengimpor lebih sedikit. Karena ekspor harus melebihi impor, negara harus dapat bergantung pada produk yang dihasilkan; tujuan dari hal ini adalah untuk mempromosikan swasembada dan Tulang punggung untuk swasembada adalah koloni di mana negara induk mengekstrak bahan baku dari koloni, mengolahnya menjadi barang jadi dan menjualnya kembali ke koloni dan negara bagian lain untuk harga yang lebih tinggi. Agar hal ini dapat terjadi, negara harus independen dari negara lain dan karena itu tidak ada kekuatan "siaga" di kancah internasional, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dan hanya yang terkuat yang bisa menang yang memotivasi negara untuk terus maju dan melakukan kebijakan agresif di kancah internasional.

Di sisi lain, kaum ekonomi liberal melihat dunia internasional sebagai sesuatu yang teratur dan korporatis. Mereka percaya bahwa dunia internasional terstruktur dengan cara yang teratur sehingga ada mekanisme dan institusi yang diberlakukan untuk memastikan perdamaian dan korporasi di antara negara-negara dan tidak kacau dan anarkis seperti pendekatan merkantilis terhadap dunia internasional. Kaum ekonomi liberal percaya bahwa, negara-negara yang bekerja sama satu sama lain akan mempromosikan perdagangan yang damai dan saling bergantung di antara negara-negara di mana negara-negara dapat membalas negara lain untuk kebaikan yang tidak mereka miliki, sehingga situasi ini dapat mencegah konflik yang lebih luas antar negara.. Sebagai contoh, Burkina Faso tidak dapat melakukan kebijakan agresif dan bermusuhan terhadap Ghana karena mereka bergantung pada pelabuhan Ghana untuk memasukkan barang-barang yang diimpor ke negara tersebut. Ini akan memastikan bahwa Burkina Faso mempertahankan hubungan persahabatan dengan Ghana agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ada semacam persatuan dan harmoni di antara negara-negara tersebut karena kesamaan kebijakan yang diambil yang membuat mereka bekerja sama satu sama lain secara damai.

- b) Kedua, kaum merkantilis menganggap negara sebagai aktor yang dominan dan rasional, sementara kaum liberal menganggap pasar sebagai aktor yang dominan. Kaum merkantilis beranggapan bahwa, negara negara seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur aliran pendapatan di pasar. Kaum merkantilis berpendapat bahwa, kegiatan ekonomi terlalu kritis sehingga harus dilakukan melalui proses yang untuk memutuskan bagaimana dan di mana sumber daya masyarakat harus ditempatkan. Menurut kaum merkantilis, sebuah proses yang "tidak terkoordinasi" akan menghasilkan struktur ekonomi yang "tidak tepat"; oleh karena itu, negara oleh

karena itu, negara harus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan merkantilis mencegah impor, yang dianggap mengancam industri dalam negeri. Karena itu pemerintah menawarkan insentif, subsidi, dll. kepada produsen dalam negeri dan mereka juga menerapkan protektif (Proteksionisme) yang pada akhirnya memberikan pemerintah kendali atas ekonomi. Perdagangan internasional ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan negara yang bertindak untuk memaksimalkan warga negara. Oleh karena itu, mereka berasumsi bahwa, sistem antar negara bersifat anarkis dan oleh karena itu adalah tugas setiap negara untuk melindungi kepentingannya sendiri. Kaum merkantilis juga berasumsi bahwa, negara adalah satu-satunya instrumen yang melaluinya orang dapat memenuhi tujuan dan aspirasi mereka.

Namun, kaum ekonomi liberal percaya sebaliknya. Mereka percaya bahwa pasar adalah aktor yang paling dominan di kancah internasional tetapi tidak sendirian karena ada aktor lain seperti individu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain. Di sinilah letak pernyataan hebat dari Adam Smith dalam tulisannya "The Wealth of Nations" bahwa, "kekayaan bangsa-bangsa akan lebih baik dilayani oleh kebijakan perdagangan bebas".

Smith menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari pembagian kerja, yang kemudian bergantung pada skala pasar. Mereka percaya bahwa, individu dalam mengejar kepentingan pribadi akan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bagi kaum ekonomi liberal, pasar merupakan jantung dari kehidupan ekonomi. Mereka mengakui bahwa, hubungan pasar belum tentu menghasilkan hasil yang baik, namun mereka tidak setuju dengan negara yang mencampuri kekuatan-kekuatan yang mengatur perekonomian. Oleh karena itu, menurut kaum ekonomi

liberal, pemerintah harus melakukan intervensi minimal dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai efisiensi maksimum; dengan kata lain, pemerintah harus mengambil pendekatan *laissez-faire* terhadap ekonomi.

- c) Ketiga, di kancah internasional, kaum merkantilis percaya bahwa kegiatan ekonomi adalah zero-sum game. sementara kaum ekonomi liberal percaya bahwa kegiatan ekonomi adalah positive-sum-game. Sebuah permainan zero-sum mengacu pada situasi di mana total kemenangan dan kerugian berjumlah nol, sehingga satu pihak diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain. Bagi kaum merkantilis, dalam permainan zero-sum, tidak mungkin satu negara untuk meningkatkan posisinya tanpa negara lain menderita kerugian yang sesuai. Sebagai contoh, dua negara membagi jumlah uang yang tetap, semakin banyak yang didapat, semakin sedikit yang tersedia untuk yang lain.

Bagi kaum merkantilis, dalam permainan zero-sum, ada persaingan dan persaingan ekonomi antara negara dan negara akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dimiliki negara lain. Berlawanan dengan hal ini, kaum ekonomi liberal percaya bahwa kegiatan ekonomi di kancah internasional adalah sebuah permainan jumlah positif, tidak seperti pendekatan merkantilis. Permainan jumlah positif mengacu pada situasi di mana total keuntungan dan kerugian lebih besar dari nol. Jumlah positif terjadi ketika sumber daya entah bagaimana ditingkatkan dan pendekatan dirumuskan di mana keinginan dan kebutuhan semua yang bersangkutan terpuaskan. Misalnya, ketika dua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan finansial dengan berpartisipasi dalam sebuah kontes, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam kontes tersebut. Jumlah positif juga dapat terjadi dalam beberapa kasus tawar-menawar distributif di mana kepentingan yang berbeda dinegosiasikan sehingga kebutuhan semua orang terpenuhi. Kaum

ekonomi liberal berasumsi bahwa, karena mereka beroperasi dalam sistem perdagangan di mana pasar adalah aktor dominan, akan selalu ada keuntungan, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Lebih jauh lagi, kaum merkantilis berpendapat bahwa, urusan politik negara lebih penting daripada ekonomi negara, sementara kaum ekonomi liberal berpikir sebaliknya. Kaum merkantilis, percayapada kerangka politik yang dilakukan untuk menjadi kerjasama ekonomi yang paling efektif dalam dunia yang penuh dengan persaingan antar kelompok dan negara.

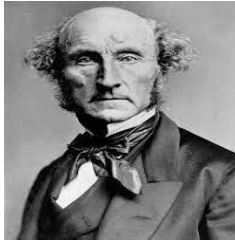
Sebaliknya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa, urusan ekonomi suatu negara lebih penting daripada aspek politik negara. Mereka percaya bahwa, tulang punggung suatu negara adalah ekonomi negara. Bagi kaum ekonomi liberal, implementasi kebijakan ekonomi yang lebih baik dapat mengarah pada keberhasilan ekonomi. Sebagai contoh, Amerika Serikat adalah hegemoni dalam sistem global kontemporer. global kontemporer karena ekonominya yang kuat. Diyakini bahwa, tanpa ekonominya, negara ini akan dianggap sebagai negara adidaya tetapi belum tentu menjadi hegemoni.

Meskipun merkantilisme dan liberalisme sepakat bahwa kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kekuatan dan keamanan negara, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pasar ekonomi. Sementara merkantilisme memandang negara sebagai instrumen kunci dalam melaksanakan dan mengembangkan ekonomi nasional, liberalisme mendukung prinsip pasar bebas. Premis dasar dari liberalisme adalah mempertimbangkan konsumen individu, rumah tangga, atau perusahaan sebagai elemen kunci dalam masyarakat (Tampubolon *et al*, 2022).

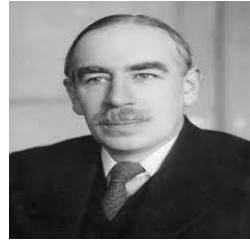
### 3.9 Transformasi pemikiran liberalisme (Mengenal pemikiran Ricardo, Mill, Keynes, dsb)



David Ricardo



John Stuart Mill



John M. Keynes

Tulisan-tulisan Adam Smith adalah bagian dari gerakan intelektual yang lebih luas yang menimbulkan perubahan ekonomi dan politik yang intens dalam masyarakat. Kaum liberal klasik, secara umum, pada saat itu diwakili oleh tulisan-tulisan John Locke (1632-1704) di Inggris dan Thomas Jefferson (1743-1826) di Amerika Serikat. Para ahli teori ekonomi cenderung berpikir tentang *laissez-faire* dalam hal pasar. Namun, filosofi ini juga menyiratkan bahwa warga negara perlu memiliki hak-hak negatif tertentu (kebebasan dari otoritas negara, seperti kebebasan dari penangkapan yang tidak sah), hak-hak positif (yang mencakup hak-hak yang tidak dapat dicabut dan kebebasan untuk mengambil tindakan tertentu, seperti kebebasan berbicara atau kebebasan pers), dan hak partisipasi demokratis dalam pemerintahan, yang tanpanya kebebasan positif dan negatif kebebasan positif dan negatif tidak dapat dijamin (Doyle, 1997). Ide-ide politik liberal klasik ini tertanam kuat dalam Deklarasi Kemerdekaan AS dan Bill of Rights, yang menjadi terkenal pada waktu yang sama dengan gagasan Adam Smith tentang kebebasan konsumen. Kaum liberalisme ekonomi cenderung berfokus pada domain di mana negara-bangsa menunjukkan sifat kooperatif, damai, dan konstruktif melalui persaingan yang harmonis. Sebagaimana perdagangan internasional, dipandang sebagai sebuah dinamika yang menguntungkan, bukan sekadar persaingan ketat untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan.

Apa yang yang benar tentang individu juga benar tentang negara. Seperti yang ditulis oleh Smith dalam Ricardo (1973) :

"Jika sebuah negara asing dapat memasok kita dengan komoditas yang lebih murah daripada yang dapat kita sendiri dapat membuatnya, lebih baik membelinya dari mereka dengan beberapa bagian dari hasil industri kita, yang digunakan sedemikian rupa sehingga kita memiliki beberapa keuntungan."

Smith secara umum menentang sebagian besar pembatasan negara terhadap pasar internasional yang bebas. Dia mengutuk tarif yang digunakan oleh para pedagang untuk memusatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, Smith mendukung Undang-Undang Navigasi merkantilis yang melindungi industri Inggris dengan mewajibkan barang-barang mereka dikirim ke koloni-koloni Inggris dengan kapal-kapal Inggris, sebuah tindakan merkantilisme.

Salah seorang ekonom modern setelah Smith, yakni David Ricardo, mengikuti Smith dalam mengadopsi pandangan liberal ekonomi klasik mengenai hubungan internasional. Dia mengejar karier yang sukses dalam bisnis, ekonomi, dan sebagai Anggota Parlemen. Ricardo adalah seorang pejuang perdagangan bebas, yang membuatnya menjadi bagian dari minoritas di Parlemen Inggris. Parlemen Inggris pada zamannya. Ia menentang Undang-Undang Jagung yang membatasi perdagangan pertanian. Tentang perdagangan, Ricardo adalah salah satu orang pertama yang mengeksplorasi beberapa ajaran hukum alam (ilmiah) tentang perdagangan. Ia berpendapat bahwa Di bawah sistem perdagangan bebas sempurna, setiap negara secara alami mencurahkan modal dan tenaga kerjanya untuk pekerjaan yang paling menguntungkan bagi masing-masing negara. Mengejar keuntungan individu secara mengagumkan terhubung dengan kebaikan universal. universal yang baik secara keseluruhan. Dengan merangsang industri, dengan menghargai kecerdikan, dan dengan menggunakan secara paling efektif kekuatan-

kekuatan khusus yang dianugerahkan oleh alam, ia mendistribusikan tenaga kerja secara paling efektif dan paling ekonomis: sementara, dengan meningkatkan massa umum produksi, ia menyebarkan manfaat umum, dan mengikat bersama, oleh satu ikatan kepentingan dan hubungan yang sama, masyarakat universal bangsa-bangsa di seluruh dunia yang beradab.

Industri, inovasi, dan "manfaat umum" dihasilkan oleh pasar internasional yang bebas. Kaum ekonomi liberal melihat hubungan negara, pasar, dan masyarakat sebagai permainan jumlah positif, di mana setiap orang dapat menghasilkan lebih banyak dengan tawar-menawar dengan orang lain daripada dengan berdagang dengan mereka, menurut jargon IPE. Di pasar, pertukaran barang dan jasa menguntungkan kedua belah pihak. Sebaliknya, para merkantilis percaya bahwa kehidupan adalah permainan tanpa hasil di mana kemenangan satu orang atau kelompok harus mengorbankan orang lain. Ricardo berpendapat bahwa perdagangan bebas ini menghubungkan seluruh dunia dengan hubungan dan kepentingan yang sama. Seperti yang sering diperdebatkan oleh mereka yang mendukung globalisasi saat ini, tindakan individu yang bebas dalam produksi, keuangan, dan struktur pengetahuan menciptakan ikatan yang kuat untuk saling menguntungkan di antara bangsa-bangsa, sehingga kebutuhan akan ikatan keamanan menjadi tidak relevan atau sama sekali tidak ada. Pasar terbuka memungkinkan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk bersatu untuk kepentingan nasional mereka dan menjadi bagian dari "masyarakat universal". Ini mengurangi atau menghilangkan motivasi untuk berperang.

Cara pandang liberalisme ekonomi yang lebih kritis dilanjutkan tradisi berfikirnya oleh John Stuart Mill (1806-1873). Bidang ekonomi politik sangat dinamis, dan perspektif liberal telah berkembang seiring dengan cara interaksi negara-pasar-masyarakat berubah untuk mencerminkan perubahan nilai dan gagasan budaya. John Stuart Mill adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan intelektual liberalisme, yang mewarisi

liberalisme dari Smith dan Ricardo. Selama lima puluh tahun, buku teks yang dia tulis, *Principles of Political with Some of Their Applications to Social Philosophy* (1848), yang diterbitkan pada tahun yang sama dengan Manifesto Komunis karya Marx, membantu mendefinisikan liberalisme.

Bahkan jika ide-ide liberal merupakan dasar intelektual dari revolusi dan reformasi yang melemahkan otoritas pusat dan meningkatkan kebebasan, Mill berpendapat bahwa ide-ide liberal telah menjadi kekuatan destruktif yang signifikan pada abad ke-18 yang muncul sebagai kapitalisme penuh di Eropa (Ryan , 1989). Mill meragukan bagaimana persaingan dan kebebasan ekonomi kapitalisme akan memengaruhi dorongan manusia yang paling kuat, pengejaran kepentingan pribadi, mampu mentransformasi menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak orang bekerja di pabrik, tetapi keadaan mereka jauh lebih buruk daripada Smith dan Ricardo. Seluruh keluarga bekerja selama enam hari seminggu selama delapan jam sehari. Banyak orang dipecat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mill mengakui masalah yang ditimbulkan sebagai efek dari ketidaksetaraan pasar hasil. Dia mengusulkan bahwa negara harus mengambil tindakan definitif untuk menyempurnakan pasar, memperbaiki kesalahannya, dan mencapai kemajuan sosial.

Dia menyarankan negara untuk bertindak secara selektif di beberapa bidang, seperti mendidik anak-anak dan membantu orang miskin, di mana upaya individu mungkin tidak memadai untuk mendorong kesejahteraan sosial. Menurut Mill, slogannya untuk mendukung desentralisasi dalam batas-batas yang masuk akal adalah "sentralisasi informasi, desentralisasi kekuasaan." Dia percaya bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, dan mungkin harus melakukannya secara hukum, tetapi dia jelas tidak setuju dengan memaksa mereka untuk membayar sekolah anak-anak mereka jika mereka tidak memiliki uang. Selain itu, pusat pendidikan berbahaya bagi negara (Ibid). Akibatnya, tindakan negara tertentu

memungkinkan pengoperasian "sekolah model" dan pembayaran pendidikan swasta.

Teori Mill tentang pendidikan dan masalah sosial lainnya mencerminkan evolusi liberalisme saat itu. Negara harus menghindari campur tangan negara lain ketika ada keraguan. Ekonomi politik yang didasarkan pada hubungan pasar antara individu dan masyarakat, bagaimanapun, menginginkan beberapa tindakan pemerintah yang terbatas. Mill bertanya-tanya tentang kapan, bagaimana, dan seberapa jauh peran pemerintah yang terlihat dapat diterima sebagai pengganti atau asisten pasar, seperti para pemikir liberal sejak zamannya. Seberapa jauh pemerintah dapat mengambil tindakan sebelum melakukan pelanggaran hak-hak individu?.

Setelah Stuart Mill, memberi sumbangsih pemikiran ekonomi liberal dengan meletakkan dasar fondasi konsep negara kesejahteraan untuk dilanjutkan oleh pemikir berikutnya, tradisi liberalisme dilanjutkan oleh John Maynard Keynes (1883–1946). Ia disebut sebagai "canes" atau "keinz" oleh orang Inggris, adalah salah satu ekonom politik paling berpengaruh di abad ke-20. Dia menonjol dalam perkembangan liberalisme karena mengembangkan dan menarik teori ekonomi yang disebut Keynesianisme, yang juga dikenal sebagai Keynesianisme. Sama seperti Mill memperhatikan dampak negatif pasar terhadap masyarakat, ide-ide Keynes semakin populer pada tahun 1930-an hingga Depresi Besar dan Perang Dunia II hingga awal tahun 1970-an. Pada tahun 1930-an, banyak ahli yang menjadi kritis terhadap pandangan *laissez-faire* yang populer dan kembali ke ide-ide Keynes untuk menjelaskan krisis dan memberikan solusi untuk masalahnya.

Keynes, seorang pegawai negeri, penulis, petani, profesor, dan direktur Bank of England, terkenal karena menentang beberapa prinsip dasar dari liberalisme ekonomi. Dia percaya bahwa krisis ekonomi Depresi Besar (*The Great Depression*) adalah bukti bahwa orang-orang di luar pasar kadang-

kadang melakukan kesalahan yang mengerikan. Pada awal tahun 1926, ia menulis (Keynes J. , 1963) :

"Mari kita jernihkan dari dasar prinsip-prinsip umum atau metafisik yang mendasari *laissez-faire*." Tidak benar bahwa individu memiliki "Kebebasan alamiah" yang mewajibkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam hal ekonomi. Tidak ada "perjanjian" yang memberikan hak-hak abadi kepada pemilik atau penerima. Kepentingan pribadi dan sosial selalu cocok karena dunia tidak diatur dari atas. Juga tidak benar bahwa kepentingan pribadi biasanya tercerahkan; lebih sering, mereka yang bertindak secara independen terlalu bodoh atau terlalu lemah untuk mencapai hal ini. Pengalaman menunjukkan bahwa kelompok sosial memiliki pemahaman yang lebih baik daripada individu yang bertindak secara individual."

Keynes menyatakan bahwa versi *laissez-faire* dari liberalisme klasik tidak dapat menjelaskan booming dan bust karena model ini tidak seharusnya terjadi. Pasar dianggap sebagai lembaga yang dapat mengoreksi diri sendiri dan menerjemahkan perilaku egois dan rasional dari pelaku individu (konsumen, pekerja, perusahaan, dll.) menjadi hasil sosial yang optimal untuk OEL. Oleh karena itu, perubahan harga seperti upah dan suku bunga akan terjadi ketika ada "guncangan" di luar sistem yang mengganggu lapangan kerja penuh, yang dengan cepat akan mengembalikan lapangan kerja penuh.

Keynes berpendapat bahwa penyebab resesi dan depresi adalah kecenderungan orang untuk membuat keputusan yang tidak bijaksana dalam situasi di mana masa depan tidak pasti dan tidak ada cara yang efektif untuk mengkoordinasikan tindakan atau berbagi risiko. Keynes menekankan bahwa meskipun orang dapat bertindak secara rasional demi kepentingan pribadi mereka, hasil kolektifnya menjadi tidak rasional dan berbahaya. Tangan yang tidak dapat dilihat jelas bertanggung jawab atas kegagalan ini. Contoh nyata dari apa yang terjadi ketika investor

menjadi ketakutan dan keluar dari pasar adalah krisis pasar saham tahun 1929, krisis Asia tahun 1997, dan krisis keuangan global saat ini.

Dalam keadaan seperti ini, orang sering memprediksi masa depan yang sangat tidak menentu, atau setidaknya merasa sulit untuk "berpikir rasional" tentang masa depan, yang menyebabkan apa yang disebut sebagai paradoks penghematan Keynes. Apa yang harus dilakukan jika seseorang terancam pengangguran? Membelanjakan lebih sedikit dan menabung lebih banyak adalah cara yang masuk akal untuk menangani ketidakpastian tentang pendapatan Anda di masa depan. Namun, jika semua orang membelanjakan lebih sedikit, akan lebih sedikit barang yang dibeli, produk yang diproduksi, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan pendapatan akan menurun.

Selain itu, tindakan yang diambil oleh orang-orang untuk mencegah resesi dan pengangguran yang dikhawatirkan semua orang sebenarnya membantu. Keynes juga khawatir tentang spekulasi ekonomi internasional dan potensi bahayanya jika tidak diawasi. Kondisi ini meningkatkan risiko ekonomi dan memperlemah pasar keuangan.

Solusi yang ditawarkan oleh Keynes adalah menggabungkan kekuatan negara dan pasar. Ini berbeda dengan gagasan Adam Smith bahwa negara harus bergantung pada tangan yang tidak terlihat tetapi mendukung yang lebih besar, hanya dalam batas tindakan negara yang konstruktif. Untuk mengimbangi irasionalitas masyarakat, Keynes mengusulkan agar masyarakat mengarahkan "kecerdasan melalui beberapa organ tindakan yang tepat atas banyak seluk-beluk bisnis swasta, namun akan membiarkan inisiatif dan usaha swasta tanpa hambatan." Negara adalah lembaga yang sesuai. "Menyusun organisasi sosial yang sosial yang harus seefisien mungkin tanpa menyinggung gagasan kita tentang cara hidup yang memuaskan," kata Keynes (ibid).

Banyak negara bagian menggunakan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

mempertahankan upah tenaga kerja selama Depresi Besar. Negara menjalankan defisit untuk sementara untuk mendorong produksi dan konsumsi, tetapi bisnis takut untuk berinvestasi karena takut inflasi. Banyak kebijakan Keynesian lainnya diadopsi oleh Presiden Franklin Roosevelt di Amerika Serikat, seperti proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan lapangan kerja, asuransi pengangguran, asuransi deposito bank untuk meningkatkan kepercayaan investor pada bank, dan jaminan sosial.

Keynes juga menyatakan bahwa negara harus menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan pasar, tetapi tidak dengan cara yang agresif atau merkantilis. Dia khawatir bahwa orang dapat dengan mudah beralih selama Depresi Besar. Ideologi seperti Fasisme atau Nazisme sebagai solusi untuk masalah mereka. Dia menemukan bahwa pemerintahan Soviet dan komunisme bersifat represif dan tidak dapat diterima, mengabaikan kebebasan individu. Berbeda dengan Hayek, Keynes berpendapat bahwa sistem liberal liberal lebih mengutamakan kebebasan individu. Keynes pada dasarnya adalah seorang humanis bermoral yang ingin melampaui masalah akumulasi kekayaan, yang dia anggap sebagai "penyakit yang agak menjijikkan", ke arah masyarakat di mana sebagian besar orang memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu luang mereka untuk menjalani kehidupan yang baik dan merenungkan, daripada membatasi mereka untuk keamanan. Adam Smith berpendapat bahwa masalah bagaimana ekonomi dapat membantu masyarakat adalah bagian integral darinya.

### **3.10 Kompromi Keynesian: Mendamaikan Negara dan Kepentingan Internasional**

Keynes juga dikenal karena membantu merekonstruksi Eropa Barat setelah Perang Dunia II dan membangun ekonomi internasional baru. Dua lembaga baru, International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, didirikan untuk mengawasi ekonomi

setelah perang pada pertemuan negara-negara Sekutu di Bretton Woods, New Hampshire, pada tahun 1944. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dibentuk tiga tahun kemudian untuk mengatur perdagangan internasional. Meskipun bukan rencananya, Keynes mengepalai delegasi Inggris, dan hasil institusionalnya mencerminkan banyak ide-idenya.

Salah satu masalah yang muncul selama pertemuan adalah bagaimana menyeimbangkan dua tujuan yang disepakati Sekutu: meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi internasional dan membantu negara-negara yang telah pulih dari perang. Keynes berpendapat bahwa di satu sisi, tindakan pemerintah yang positif diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak lain. Dia juga membayangkan sebuah sistem internasional yang liberal atau terbuka di mana kekuatan pasar dan kebijakan perdagangan bebas akan memainkan peran penting dalam setiap tujuan kebijakan ekonomi internasional sebuah negara.

Berdasarkan ide-ide Keynesian yang mendalam tentang politik dan ekonomi internasional, Kompromi Keynesian mengusulkan bahwa negara-negara akan bekerja sama dengan damai di bawah tiga lembaga Bretton Woods untuk mengelola ekonomi internasional. Negara akan secara bertahap mengurangi kebijakan peraturannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjadi lebih kompetitif. Untuk melindungi perdagangan domestik dan kontrol modal, kebijakan liberal ekonomi dihilangkan dalam negosiasi internasional.

Banyak negara industri menggunakan kekuatan negara untuk melengkapi, memperkuat, dan menstabilkan ekonomi pasar di bawah sistem liberal Bretton Woods yang licik dari tahun 1930-an hingga 1970-an. Di dunia industri, IPE mengutamakan perspektif Keynesian tentang ***Embedded Liberalism*** : pasar internasional yang kuat tunduk pada batasan sosial dan politik serta peraturan yang mencerminkan prioritas domestik.

Menurut banyak ahli ekonomi politik, setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mengeluarkan banyak uang untuk mempertahankan sistem moneter global dan menyediakan pertahanan yang harus dibayar sendiri oleh setiap sekutu, yang membuat sistem ini berhasil. Akibatnya, Jepang dan Eropa Barat Barat dapat membelanjakan lebih banyak uang untuk memperbaiki diri sambil menikmati sistem perdagangan terbuka, uang yang sehat, dan perdamaian dan keamanan yang mendorong pertumbuhan pasar global. Secara umum, teori stabilitas hegemonik menyatakan bahwa ketika negara dominan, atau hegemon, menyediakan barang publik internasional tertentu dengan biaya sendiri untuk menjaga pasar terbuka untuk kepentingan dirinya dan sekutunya, pasar internasional bekerja paling baik (Kindleberger, 1970).

Namun, kepentingan AS, Eropa Barat, dan Jepang yang terus berubah, dan harga yang mahal untuk mempertahankan hegemoni (atau bertahan, tergantung pada siapa). Pada akhir tahun 60-an, negara didorong oleh agenda domestik untuk mempertahankan atau meningkatkan perlindungan sektor ekonomi dan industri yang sedang berkembang. Kekuatan dan kekayaan mulai berpindah dari Amerika Serikat ke Eropa Barat dan Jepang sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ini mengubah Jepang dan hubungan penting Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menyadari bahwa perang perang di Vietnam akan sangat mahal tanpa dukungan finansial, keuangan, dan politik dari sekutu. Semakin sulit untuk mempertahankan keterbukaan sistem moneter, perdagangan, dan keuangan internasional.

### **3.11 Pendekatan teori kritis dalam HI**

Salah satu cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan suatu disiplin ilmu adalah dengan mengendalikan sejarahnya, yang menjelaskan sifat dan asal-usul suatu bidang studi. IPE tidak berbeda. Benjamin Cohen (2008) menjelaskan dan menjelaskan sejarah disiplin ilmu ini dan menjelaskan asal-usulnya, mengesahkan pembagian IPE menjadi "Amerika" dan "Inggris",

menekankan IPE sebagai hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, dan cenderung menghindari IPE kritis (Ashworth, 2011).

Cohen berpendapat bahwa IPE muncul beberapa dekade yang lalu. Menurut Cohen, IPE adalah upaya terbaru untuk menggabungkan ilmu politik dan ekonomi sebelum tahun 1970-an, ketika keduanya dianggap sebagai bidang ilmu yang berbeda. Meskipun demikian, untuk membenarkan pandangan Cohen tentang IPE setelah tahun 1970, Cohen juga memberikan ulasan singkat tentang "prasejarah" bidang tersebut. Meskipun hanya singkat, presentasi Cohen tentang prasejarah IPE menyingkirkan IPE dari sejarah yang lebih luas dan menyingkirkan IPE yang kritis.

Berbeda dengan Cohen, studi historikal menyatakan bahwa IPE telah ada sebelum tahun 1950 (Ashworth, *ibid*), bahwa sebagian besar IPE terdiri dari tradisi sosialis yang kritis, dan bahwa IPE yang kritis ini merupakan komponen penting dari arus intelektual Inggris diparuh pertama abad ke-20. Tradisi kritis ini tidak terisolasi; itu adalah bagian dari kanon yang lebih luas yang mencakup pendekatan yang lebih liberal, dan saya akan memeriksa hal ini melalui karya H.N. Brailsford.

Tiga komponen pemikiran Brailsford terkait dengan pekerjaannya di Indian River State, diantaranya : **sosialismenya**, yang mendorongnya untuk mengutuk ketidakadilan, ketidakadilan, dan ketidakefisienan kepentingan kapitalis global; internasionalismenya, yang mendorongnya untuk mengutuk nasionalisme dan anarki internasional negara-negara; dan kebebasan demokratis, yang dia anggap penting untuk semua wacana politik dan praktik. Ia akan terus mendukung pembangunan sistem pemerintahan yang adil dan adil di seluruh dunia melalui IR. Cara dia menangani HI dipengaruhi oleh tiga faktor utama.

**Yang pertama** adalah karya Norman Angell, dan **yang kedua** adalah karya J.A. Hobson, yang akan menjadi dasar kritiknya terhadap kapitalisme. Brailsford adalah pengagum

berat buku *The Great Illusion* karya Angell, dan berikutnya *The War of Steel and Gold* adalah upaya yang bersahabat untuk mengambil Analisis Angell tentang kegagalan kebijakan luar negeri negara adikuasa dan memberikan rasa sosialis yang lebih agresif. Pengaruh **ketiga** pada Brailsford adalah karya-karya tulisnya yang ia lahirkan di Balkan, terutama di Makedonia Turki.

Banyak dari Gagasan Brailsford tentang tatanan internasional sudah terlihat dalam karyanya pada tahun 1906 tentang masalah Makedonia, delapan tahun sebelum ia menerbitkan *The War of Steel and Gold*. Pada dasarnya, alat untuk Brailsford mengembangkan pemikiran ekonomi politik kritisnya didasarkan pada pemikiran Hobson dan Angell. Hobson berpendapat bahwa penyebab ketidakstabilan adalah kebijakan kapitalis negara-negara besar. Hobson berpendapat bahwa kebijakan domestik yang mendukung kepentingan pemburu rente adalah sumber utama imperialisme baru. Untuk menjaga keuntungan tinggi, upah harus rendah. Namun, hal ini memiliki efek yang tidak diinginkan, yaitu menekan pasar dalam negeri dan menyebabkan produksi barang dan keuangan yang berlebihan di dalam negeri.

Akibatnya, negara-negara kapitalis besar dipaksa untuk mencari pasar baru untuk barang-barang dan surplus keuangan mereka melalui kontrol pasar luar negeri. Hal ini mengarah pada sebuah imperialisme yang pada dasarnya berbeda dari gelombang akuisisi imperialisme sebelumnya, dan yang menjelaskan ekspansi oleh kekuatan-kekuatan besar ke daerah-daerah yang tidak melayani kepentingan kekuatan-kekuatan itu secara keseluruhan, tetapi melayani kepentingan pemilik modal keuangan. kepentingan para pemilik modal keuangan. Karena kepentingan kapitalisme pada profit, Brailsford memperluas gagasan kapitalisme barang rampasan nasional yang menyebabkan ketidakstabilan. Itu membantunya memahami bagaimana perang modern disebabkan oleh kapitalisme. Angell menunjukkan kepada Brailsford betapa pentingnya menggunakan pendekatan ekonomi politik yang lebih internasional. Analisis yang dilakukan oleh Angell pada tahun

1910 tentang konstruksi sistem internasional menunjukkan bahwa gagasan penaklukan yang dahulu sudah tidak relevan lagi.

Brailsford setuju, tetapi melalui pembacaannya terhadap pemikiran Hobson, ia berpendapat bahwa kekuatan kapitalis besar telah menemukan cara untuk mendominasi orang lain tanpa harus melakukan penaklukan, melainkan melalui modal dan kuasa politik. Dengan demikian, Hobson telah memberikan Brainsford alat intelektual untuk mengkritik kapitalisme, sementara Angell telah menunjukkan sejauh mana. sejauh mana bentuk-bentuk lama hubungan internasional sekarang sudah usang.

Hal yang mendasar dari analisis Brainsford adalah bahwa keseimbangan kekuatan atau *Balance Of Power* yang mungemuka dalam Studi Hubungan Internasional pada tahun 1914 berbeda dengan konsep perimbangan kekuatan pada abad-abad sebelumnya. Dia menolak konsep perimbangan kekuatan sebagai 'cita-cita yang dapat mencukupi dirinya sendiri' yang, dengan sendirinya sendiri, dapat menjelaskan perilaku negara. Dengan demikian, sebelum konsep perimbangan kekuatan demi kepentingan kekuasaan diadopsi oleh HI realis sebagai dasar dari interpretasi politik-kekuasaan atas politik dunia, Brainsford telah menolaknya menolaknya sebagai sesuatu yang naif secara politis. Sebaliknya, Kekuasaan dicari untuk tujuan-tujuan tertentu. Sifat dari tujuan kekuasaan mempengaruhi cara perimbangan kekuasaan diwujudkan.

Karena kekuasaan dalam brainsford telah ter-rekonstruksi terletak pada keuangan, bukannya tanah, maka perebutan antar negara kini lebih pada kontrol atas peluang investasi dan pangsa pasar. Hal ini, bagi Brainsford, menjelaskan pergeseran konflik dari Eropa ke kontrol atas dunia luar Eropa. Dengan demikian, negara-negara menjadi sarana yang digunakan oleh para elit mereka untuk mendorong kepentingan kelompok mereka sendiri. Tujuan dari keseimbangan kekuatan baru ini bukanlah kontrol langsung atas wilayah, **melainkan kontrol tidak langsung melalui struktur kapitalisme** dan ancaman kekuatan

melalui pembangunan persenjataan Akibatnya, negara yang lebih lemah dalam sistem ini , memungkinkan untuk mempertahankan kemerdekaannya, tetapi tetap berada di bawah kendali ekonomi negara-negara besar, karena kurangnya salah satu komponen kekuatan tersebut.' (ibid., hal. 72)

Dengan demikian, bagi Brailsford, **ada hubungan penting antara anarki internasional di satu sisi, dan eksploitasi kapitalis di sisi lain.** Keseimbangan kekuasaan di bawah anarki internasional melayani kepentingan-kepentingan tertentu yang mengendalikan negara: 'bukan kebutuhan nasional tetapi kepentingan kelas yang mengharuskan kita untuk melakukan perdamaian bersenjata' (ibid,p. 308). Persaingan untuk menguasai negara dan wilayah secara informal telah menyebabkan penggunaan persenjataan sebagai alat intimidasi kekuatan besar, daripada penaklukan.

Dengan kata lain, perkembangan pesat sistem industri kapitalis di atas sistem negara-bangsa telah secara fundamental mengubah sifat anarki internasional. Karena negara-negara tidak mencari kekuasaan sebagai tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan paling kuat dalam negara, kepentingan kapitalis sekarang mengarahkan kekuasaan negara dan kekuatan militer menuju kontrol ekonomi tidak langsung daripada kontrol fisik (koloialisme/perang) yang akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Konsep tentang perubahan sifat kekuasaan negara, dan perannya dalam mengembangkan bentuk-bentuk baru imperialisme, tidak hanya terbatas pada kalangan radikal Inggris. Bahkan, Isaiah Bowman, salah satu arsitek tatanan tglobal yang dipimpin AS setelah 1945, setuju bahwa negara untuk pengembangan ekonomi nasional, dengan kebutuhan besarnya terhadap bahan baku vital, secara alami akan memiliki kecenderungan untuk mengotrol masyarakat-masyarakat pada wilayah yang berlimpah sumberdaya Hal ini, bagi Bowman, merupakan perubahan radikal dari masa keseimbangan

kekuasaan agraria pada awal abad ke-19 (1928, hal. 12-14; 1930, hal. 18-20).

### **3.12 Ekonomi Politik Internasional yang Kritis: Pergesaran Posisi Power**

Robert Cox adalah salah satu pemikir yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi politik dalam tradisi pendekatan yang kritis. Pemikiran Robert Cox setidaknya dalam dua hal: pertama, dalam karakterisasi teori kritis sebagai **teori emansipatoris** yang didasarkan pada dekonstruksi dari institusi-institusi yang ada dan konfigurasi kekuasaan (1981), dan kedua, karena keterlibatannya kembali dengan karya Antonio Gramsci.

Kedua intervensi ini berarti bahwa kriteria penilaian untuk IPE kritis telah menjadi upaya untuk mengungkapkan suatu relasi sosial dan menautkannya pada suatu teori tertentu tentang perubahan historis (Bieler & Morton, 2001). Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa kesamaan antara premis-premis awal dari analisis Cox dan premis-premis dari analisis liberal yang lebih konservatif. Cox menganggap globalisasi sebagai proses yang digerakkan oleh elit, di mana negara-negara dipengaruhi oleh posisi khusus mereka dalam proses global yang lebih besar. Oleh karena itu, aparatus negara tertentu berfungsi sebagai penghubung antara restrukturisasi global. Hal ini sangat erat terkait dengan kapitalisme global, khususnya sektor keuangan dan produksi. Oleh karena itu, tuntutan ekonomi global memengaruhi kepentingan kekuatan sosial nasional.

Organisasi internasional, baik formal maupun informal, muncul untuk menghubungkan negara-negara kapitalis besar dengan ideologi dan wacana neoliberal, yang digunakan sebagai alasan politik untuk struktur (Cox dalam B.Hettne (ed.), 1995). Akibatnya, aparatus negara tertentu bertindak sebagai mediator antara restrukturisasi global kapitalisme global dan bidang-bidang keuangan dan produksi yang paling erat terkait dengan

perubahan eksogen ini. Oleh karena itu, Kepentingan kekuatan sosial nasional tunduk pada tuntutan ekonomi global.

Kekhawatiran serupa juga muncul dalam perspektif neo-Gramscian dan fokus mereka pada agensi politik modal (Morton, 2007). Pendekatan-pendekatan ini, dalam banyak hal, telah menjadi pusat dari analisis materialis historis dalam IPE. Karakteristik dominan mereka adalah posisi normatif yang kritis dan analisis perjuangan kelas sebagai Jembatan untuk memahami restrukturisasi kapitalisme global; dalam hal ini mereka adalah turunan logis dari analisis Cox yang diuraikan di atas. Kontribusi utama mereka adalah pemeriksaan bentuk-bentuk kepemimpinan budaya dan moral yang dimediasi melalui berbagai macam berbagai institusi dan organisasi sosial dalam memahami hegemoni kelas dalam tatanan dunia kontemporer.

Pandangan lainnya dalam melihat perubahan struktur kuasa dan relasinya terhadap perkembangan kapitalisme, dihadirkan oleh Stephen Gill. Ia berusaha untuk menjelaskan struktur sejarah perkembangan peradaban yang diliberalisasi dan dikomodifikasi yang didorong oleh restrukturisasi kapital (Gill, 1995). Proses liberalisasi dan komodifikasi ini, oleh Hill dinilai sebagai struktur yang menjadi ciri tatanan dunia kontemporer. Inti dari penjelasannya adalah 'perluasan spasial dan pendalaman sosial' dari definisi-definisi tertentu dari perusahaan sosial dan politik individualistik.

Gill mencatat bahwa akumulasi, legitimasi, konsumsi dan kerja yang menjadi fitur-fitur khas dari kapitalisme membawa serta kecenderungan ekspansif. Kecenderungan ekspansif ini, menjelaskan tentang kebutuhan akan ruang sebagai perputaran modal, tidak hanya pada skala lokal, melainkan juga akan meluas secara transnasional. yang penting bagi transformasi yang lebih luas ini, adalah bahwa ia mendorong kemunculan dari sebuah blok historis. Blok ini terdiri dari struktur politik lokal dan juga membentuk masyarakat politik dan masyarakat sipil global (ibid., h. 400).

Konsepsi perluasan atau ekspansi ruang bagi kapitalisme. Gill menggambarkan bahwa dalam struktur politik baik lokal hingga transnasional, struktur modal yang berdinamika secara transnasional mendominasi kebijakan-kebijakan yang dioperasikan pada struktur politik. (ibid., hal. 430, 407). Yang dimaksud dengan modal transnasional oleh Gill adalah perusahaan-perusahaan transnasional, yang beroperasi di berbagai yurisdiksi (negara). Kekuatan struktural modal sangat dipengaruhi pada pengurangan atau penghapusan hambatan terhadap mobilitas modal internasional, serta insentif yang dibebankan kepada negara-bangsa. Lebih jauh lagi, karakter global dari hubungan kekuasaan antara negara dan struktur kapitalis transnasional ini dianggap sebagai bukti nyata, mengingat kebangkitan perusahaan-perusahaan transnasional dan tingkat mobilitas modal internasional.

### **3.13 Struktur Sistem Global (Immanuel Wallerstein) dan Penyebabnya**

Pada satu titik tertentu, situasi perkembangan kapitalisme global tersebut, memahat struktur hubungan relasi dan klasifikasi negara-bangsa di dunia. Situasi ini tergambarkan dalam teori **sistem dunia modern (*World System Theory*)** yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Ajaran Neo-Marxis dan mazhab "Annales" dalam bidang membentuk dasar teori MWS. Dengan cara ini, Wallerstein melihat tatanan ekonomi dunia sebagai kumpulan unit analisis yang secara sistematis terhubung satu sama lain (Wallerstein dalam Maiwan, 2015).

Dalam pandangan wallerstein globalisasi dan kapitalisme telah membentuk struktur negara-negara. Teori MWS yang dikemukakan menyatakan bahwa ekonomi internasional adalah tempat di mana negara-negara maju berkompetisi dengan negara-negara pinggiran yang lemah dan terbelakang; keduanya bersaing untuk memperoleh penghisapan, yang menghambat negara-negara terbelakang.

Konsep utama dari teori MWS adalah bahwa dunia kontemporer hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan divisi tenaga kerja tunggal dan sistem budaya yang berbeda yang membentuk hierarki internasional melalui konflik antara negara dan kelas. Dalam hierarki tersebut, "pusat", atau pusat, adalah yang paling maju dan dominan, dan "pinggiran", atau pinggiran, adalah yang tergantung dan terbelakang. Secara ekonomi dan politik, wilayah metropolis "pusat" menyebabkan keterbelakangan di daerah-daerah "pinggiran"; hubungan antara "pusat" dan "pinggiran" ditandai dengan aliran surplus ke negara-negara "pusat". Dengan kata lain, kemajuan di wilayah pusat menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pinggiran. Negara-negara pinggiran berada dalam pusaran atau siklus keterbelakangan.

Menurut teori MWS, ekonomi internasional adalah tempat di mana negara-negara maju bersaing dengan negara-negara pinggiran yang lemah dan terbelakang untuk kepentingannya sendiri. Hasilnya adalah penghisapan, yang menghalangi negara terbelakang dari kemajuan ekonomi dan politik (ibid). Karena pembagian kerja global yang terus-menerus, negara-negara pinggiran selalu bergantung pada negara maju. Negara maju menikmati aliran surplus perdagangan, yang memiskinkan negara-negara pinggiran. Ini dicapai melalui kemampuan ekonomi, jenis produksi, teknologi, dan strategi perdagangan yang direncanakan sedemikian rupa. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan dari perspektif hubungan internasional adalah sama.

Penciptaan struktur hubungan ekonomi seperti itu dapat dilacak jauh ke belakang, mulai dari awal sistem ekonomi-kapitalis global sekitar tahun 1500-an dan kemudian berkembang melalui fase-fase penting, menurut Wallerstein (1984) (Wallerstein, 1984). Dia menyatakan bahwa perkembangan sistem ekonomi kapitalis global terdiri dari pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Selain itu, sistem ekonomi global mengalami irama perputaran, atau irama perputaran,

sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang di seluruh dunia. Perputaran ini, yang berulang kali terjadi selama masa krisis, menempatkan suatu negara di posisi sentral, setengah pinggiran, atau bahkan di pinggiran.

Para teoritis MWS menganggap negara dan pasar sebagai "fenomena kedua" kekuatan sosial ekonomi yang lebih dalam, yang mengintegrasikan pinggiran dan pusat untuk mendorong ekonomi global. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak lagi melihat kelas sosial dan status sebagai cara untuk membagi orang di suatu negara; sebaliknya, mereka melihatnya sebagai pelapisan dalam sistem ekonomi global. Akibatnya, sistem ekonomi global tidak lagi terdiri dari negara-negara terisolasi; sebaliknya, itu adalah sistem global yang kompleks dan telah mengalami transformasi selama bertahun-tahun.

Menurut Wallerstein, untuk melawan sistem ini, negara-negara berkembang harus melakukan gerakan antisistem berskala global. Sumber daya ekonomi yang berlebihan harus menjadi fokus gerakan ini. Tujuannya adalah untuk menghentikan penghisapan surplus ekonomi global secara signifikan dengan mengurangi tingkat laba dan meningkatkan perhatian pada masalah pemerataan. Namun, kelemahan teori ini adalah kecenderungannya untuk mengabaikan kesalahan pembangunan di negara-negara berkembang daripada negara maju; seolah-olah semua dampak negatif pembangunan pada negara pinggiran disebabkan oleh kebijakan buruk yang sengaja dibuat oleh negara maju. Para teoritis MWS kurang memperhatikan fakta bahwa banyak keterbelakangan yang terjadi di negara-negara pinggiran (berkembang) disebabkan oleh faktor internal mereka sendiri, seperti struktur sosial, sistem politik, tingkat korupsi, orientasi budaya, tingkat pendidikan, lemahnya institusi, dan motivasi kemajuan.

### **3.14 Ekonomi Politik Internasional dalam Pendekatan Neo-Gramscian**

Neo-Gramscianisme adalah pendekatan teori kritis untuk studi hubungan internasional (HI) dan ekonomi politik global (GPE). Pendekatan ini menyelidiki hubungan antara gagasan, lembaga, dan kemampuan material yang membentuk kontur khusus pembentukan negara. Karya dan pemikiran Antonio Gramsci terkait hegemoni dan bagaimana ia terbentuk, sangat mempengaruhi teori ini. Neo-Gramscianisme melihat bagaimana konstelasi tertentu dari kekuatan sosial, negara, dan konfigurasi ideasional yang dominan mendefinisikan dan menopang tatanan dunia (Frederic & Larsen , 1988).

Dalam pendekatan arus utama terhadap ekonomi politik internasional atau global, sentralitas ontologis negara tidak dipertanyakan. Sebaliknya, neo-Gramscianisme, dengan menggunakan pendekatan yang oleh Henk Overbeek, Profesor Hubungan Internasional di VU University Amsterdam, disebut sebagai materialisme historis transnasional, "mengidentifikasi pembentukan negara dan politik antarnegara sebagai momen dinamika transnasional akumulasi kapital dan pembentukan kelas (Henk , 2000)."

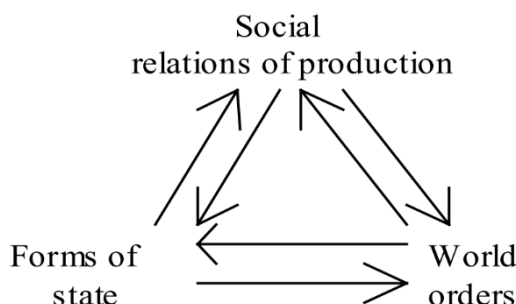
Neo-Gramscianisme memandang kedaulatan negara sebagai sesuatu yang tunduk pada sistem ekonomi global yang ditandai dengan munculnya sistem keuangan transnasional dan sistem produksi transnasional. Para pemain utama dalam sistem ini, perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, telah berevolusi menjadi "blok historis transnasional" yang menjalankan hegemoni global (berbeda dengan pandangan realis yang melihat hegemoni sebagai "kekuatan dominan dari sebuah negara atau sekelompok negara") (Cohn, 2005).

Blok historis ini memperoleh otoritasnya melalui persetujuan diam-diam dari penduduk yang diperintah yang diperoleh melalui teknik pemaksaan persuasi intelektual dan kultural, yang sebagian besar tidak melibatkan kekerasan. Blok ini menghubungkan dirinya dengan kelompok-kelompok sosial lain yang telah terlibat dalam perjuangan politik untuk memperluas pengaruhnya dan berusaha untuk memperkuat kekuasaannya melalui standarisasi dan liberalisasi ekonomi nasional, menciptakan rezim peraturan tunggal (misalnya Organisasi Perdagangan Dunia).

Sebelumnya telah dijelaskan Robert W. Cox (1983) dan Stephen Gill (1990), banyak menggunakan pendekatan gramscian. Dua penulis ini, memperkenalkan alat analisis baru, melalui dialektika materialisme historis Marx, dan juga karya Gramsci bersama dengan karakter nalar emansipatorisnya sebagaimana yang dianjurkan oleh Mazhab Frankfurt. Dengan demikian, konsep hegemoni Gramsci ditafsirkan ulang untuk membaca **internasionalisasi produksi**, dan **pemeliharaan agenda lembaga-lembaga internasional** yang menguntungkan kepentingan negara-negara pusat ekonomi internasional (Mendonca & Demuner, 2016).

Berbeda dengan teori Hubungan Internasional (HI) konvensional yang menyederhanakan hegemoni menjadi dominasi tunggal berdasarkan kekuatan ekonomi dan militer negara, perspektif neo-Gramscian yang dikembangkan oleh Cox memperluas cakupan konsep hegemoni. Hegemoni diartikan sebagai ekspresi persetujuan yang luas, termanifestasi dalam penerimaan ide-ide dan didukung oleh sumber daya material dan institusi. Awalnya, hegemoni muncul dari kekuatan sosial yang memegang peran sentral dalam suatu negara, namun kemudian diperluas ke skala global. Dalam konteks tatanan dunia, keadaan hegemoni dapat timbul melalui konjungsi yang koheren atau sebaliknya. Oleh karena itu, hegemoni dianggap sebagai bentuk dominasi, tetapi lebih terkait dengan konsensus sehingga 'dominasi oleh negara yang kuat mungkin menjadi syarat yang diperlukan, namun bukan kondisi yang cukup untuk mencapai

hegemoni'. Poin penting yang perlu ditekankan adalah bahwa terbentuknya hegemoni melalui struktur masyarakat, ekonomi, budaya, gender, etnisitas, kelas, dan ideologi. Hegemoni dalam kerangka sejarah dipengaruhi oleh tiga bidang kegiatan utama: hubungan sosial produksi, mencakup totalitas hubungan sosial dalam bentuk material, institusional, dan diskursif yang melahirkan kekuatan sosial tertentu; bentuk-bentuk negara, yang melibatkan kompleksitas negara-masyarakat sipil secara historis; dan tatanan dunia, yang tidak hanya mencerminkan fase-fase stabilitas dan konflik, tetapi juga memberikan ruang untuk pemikiran tentang bentuk-bentuk alternatif. Seperti yang dijelaskan oleh Cox (1981) pada gambar berikut ini:



**Gambar 1.** Hubungan Dialektis dari Kekuatan-kekuatan

Secara garis besar, Cox hendak menggambarkan bahwa relasi sosial produksi dalam pendekatan Gramsci, mengalami internasionalisasi. Cox dalam hal ini, bagaimana pemerintah nasional telah kehilangan banyak otonomi dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga bagaimana negara masih menjadi bagian integral dari proses ini.

Selanjutnya, Teori Kritis memiliki hubungan yang kuat dengan ekonomi politik Marxis dalam konteks internasional. Tiga gagasan utama positivisme ditolak oleh teoritis kritis. Mereka adalah realitas eksternal yang objektif, perbedaan antara subjek dan objek, dan ilmu sosial tanpa nilai. Menurut Teoritis Kritis, tidak ada hukum sosial yang abadi yang mengatur ekonomi global

atau politik global. Setiap aspek sosial, termasuk hubungan internasional, memiliki sejarah. Sistem internasional terdiri dari negara-negara yang paling kuat, dan dunia sosial adalah hasil dari waktu. Tidak ada perbedaan mendasar antara subjek (analisis) dan obyek (fokus analisis) analisis karena politik dunia telah dibangun dan belum ditemukan.

Teoritis kritis mencari pengetahuan untuk tujuan politis, yaitu untuk membebaskan manusia dari struktur politik dan ekonomi. Mereka mencari pengetahuan ini dalam dunia yang menekan yang dikendalikan oleh kekuatan hegemon, terutama negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Teoritis ini berusaha untuk memecahkan dominasi negara-negara kaya di belahan bumi utara atas negara-negara miskin di belahan bumi selatan di seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, EPI Marxis dan Teori Kritis tidak dapat dipisahkan. Idealisme juga mengiringi keinginan mereka untuk perubahan progresif dan keinginan mereka untuk menggunakan teori untuk membawa perubahan (Jackson & Sorensen, 2009).

Pada kenyataannya, Teori Kritis secara sadar atau tidak sadar telah menyuarakan agenda (isu) yang telah disimpan atau tidak diperhatikan oleh pendekatan tradisional atau klasik dengan metode berpikir positivis. Ketika pemikiran kritis yang ditawarkan teori ini muncul, banyak hal yang kemudian muncul dalam diskusi HI. Meskipun konsep negara dan sistem negara tetap ada, masalah atau agenda yang dibahas dalam HI lebih luas daripada hanya masalah tersebut. Studi HI muncul dengan masalah seperti perempuan, kesehatan, kemiskinan, lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, dll. Yang mana dalam konteks ekonomi politik, teori kritis mencoba untuk melihat alternatif lain dalam hubungan ketergantungan negara-negara di dunia dan hubungan sistem produksi yg mewarnainya.

### **SOAL LATIHAN**

1. Jelaskan bagaimana perubahan model kapitalisme modern melalui pemikiran Brainsford!
2. Jelaskan Inti Pemikiran Robert Cox dan Stephen Gill, dalam konteks ekonomi politik kritis
3. Jelaskan Bagaimana Struktur Negara-Negara di dunia (World System Theory) oleh Immanuel Wallerstein!



# **BAB IV**

## **SEJARAH DAN DINAMIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

### **4.1 Sejarah Perdagangan Internasional**

Perdagangan merupakan wujud interaksi yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Secara sederhana perdagangan dalam dikatakan sebagai proses jual beli terhadap suatu benda yang dilakukan minimal oleh dua pihak, kemudian perdagangan berkembang dengan tidak hanya dalam bentuk produk barang namun juga jasa. Kemudian, banyak literatur yang menggambarkan sejarah perdagangan termasuk perdagangan internasional yang telah terjadi sejak zaman ribuan tahun sebelum masehi dilakukan pada masa kerajaan dimulai dengan sistem barter atau bertukar barang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Setelah barter dilakukan, penggunaan mata uang berbentuk logam atau perak juga digunakan untuk bertransaksi.

Perdagangan yang dilakukan pada zaman lampau sebelum era moderen saat ini dapat dikatakan memiliki banyak kendala dan tantangan, seperti halnya ketersediaan transportasi sangat terbatas membuat perpindahan barang yang ditransaksikan tidak berjalan dengan lancar. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman lahirnya teknologi seperti transportasi dan komunikasi menjadikan sistem perdagangan memasuki era moderen atau terbaru sehingga perpindahan barang yang diperdagangkan menjadi sangat lancar. Didukung dengan perkembangan zaman, maka perdagangan menjadi sangat maju termasuk jika dikaitkan dengan perdagangan yang dilakukan oleh satu negara bersama negara lainnya dalam bentuk perdagangan internasional.

Untuk mengenal bentuk perdagangan internasional dapat dilihat dalam dua kegiatan yaitu ekspor dan impor. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki makna bahwa ekspor adalah perpindahan produk yang diperdagangkan dari dalam negeri ke luar negeri (keluar) dan impor adalah perpindahan produk yang diperdagangkan dari luar negeri ke dalam negeri (masuk). Kehadiran perkembangan perdagangan internasional sangat mendukung perkembangan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan sumberdaya yang sebelumnya tidak ada dipenuhi oleh suatu negara karena keterbatasan saat ini dapat dengan mudah didapatkan, selain itu perdagangan internasional juga menyebabkan masing-masing individu masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan jumlah yang beragam serta sesuai kebutuhannya.

## **4.2 Dasar Terjadinya Perdagangan internasional**

Setiap negara di dunia secara alami akan terlibat dalam interaksi dengan negara-negara tetangganya, dan salah satu bentuk interaksi yang umum adalah perdagangan internasional. Terdapat beberapa alasan mendasar terjadinya perdagangan internasional, di antaranya (Eddie *et al*, 2021):

- a. Revolusi informasi dan transportasi yakni berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan sistem berbasis komputer, kemajuan di bidang informasi termasuk penggunaan satelit dan digitalisasi pemrosesan data, serta perbaikan dalam peralatan komunikasi.
- b. Interdependensi kebutuhan yakni setiap negara memiliki keunggulan dan kelebihan dalam berbagai aspek, termasuk sumber daya alam, manusia, dan teknologi. Hal ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya.
- c. Liberalisasi ekonomi yaitu kebebasan dalam transaksi dan kerjasama, yang mendorong setiap negara untuk mencari peluang melalui interaksi perdagangan internasional.

- d. Asas keunggulan komparatif berupa keunikan suatu negara yang tercermin dari kepemilikan yang tidak dimiliki negara lain, menciptakan keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.
- e. Kebutuhan devisa di mana kebutuhan akan devisa untuk memenuhi segala kebutuhan suatu negara, yang dapat diperoleh melalui pemasukan dari perdagangan internasional.
- f. Adanya perbedaan selera berupa perbedaan selera antar negara memungkinkan terjadinya perdagangan saling menguntungkan, di mana masing-masing negara dapat mengimpor barang sesuai dengan kebutuhan selera penduduknya.
- g. Adanya keanekaragaman kondisi produksi yakni perdagangan diperlukan karena keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara, memungkinkan pertukaran barang dan jasa yang menguntungkan.
- h. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup yakni perbedaan dalam kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di masing-masing negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional, terutama dalam barang-barang seni atau kerajinan yang mencerminkan budaya dan gaya hidup masyarakat.

Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan memperoleh manfaat, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan mentransfer teknologi modern. Teori perdagangan internasional menganalisis dasar terjadinya perdagangan dan kebijakan yang mempengaruhi pembatasan perdagangan. Pasar valuta asing dan neraca pembayaran juga menjadi fokus dalam ilmu ekonomi internasional, mencakup aspek mikroekonomi dan makroekonomi. Selanjutnya, setiap negara yang melakukan perdagangan Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan merasakan sejumlah manfaat, termasuk (Ristiyani *et al*, 2022):

1. Akses barang yang tidak dapat diproduksi secara lokal yakni perbedaan dalam hasil produksi antar negara disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi geografi, iklim, dan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara mandiri.
2. Keuntungan dari spesialisasi yakni kegiatan perdagangan luar negeri bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui spesialisasi. Meskipun suatu negara dapat memproduksi barang yang sama dengan negara lain, terkadang lebih efisien untuk mengimpor barang tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang dapat memproduksi kain, tetapi Jepang lebih efisien. Dalam situasi ini, spesialisasi dalam perdagangan memungkinkan penggunaan faktor produksi dengan lebih efisien dan memberikan keuntungan lebih besar daripada produksi dalam negeri.
3. Ekspansi pasar dan peningkatan keuntungan yakni dalam beberapa kasus, pengusaha khawatir tentang kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga produk mereka. Melalui perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesin mereka dengan maksimal dan menjual kelebihan produknya ke luar negeri.
4. Transfer teknologi modern yakni perdagangan internasional memfasilitasi pertukaran teknologi yang lebih efisien dan metode manajemen modern antar negara. Dampak perdagangan internasional mencakup pertukaran barang dan jasa, pergerakan sumber daya melintasi batas negara, dan penyebaran penggunaan teknologi, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

## 4.3 Teori dalam Perdagangan Internasional

Kegunaan teori perdagangan internasional adalah untuk melakukan analisis terhadap dasar pelaksanaan perdagangan dan manfaat yang didapatkan. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan beberapa jenis teori perdagangan internasional adalah sebagai berikut (Hilmi & Hamka, 2021).

### 1. Keunggulan Absolut

Filsafat ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme menyatakan bahwa kunci utama untuk membuat suatu negara menjadi kaya dan berkuasa adalah dengan meningkatkan ekspor lebih banyak daripada impor. Kelebihan ekspor ini diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan dari logam mulia, terutama emas (Salvatore, 1997:23). Pada tahun 1776, Adam Smith mengeluarkan bukunya yang terkenal dengan judul *The Wealth of Nations* yang secara kritis menentang pandangan merkantilis dan sebaliknya menganjurkan kebijakan perdagangan bebas sebagai pendekatan terbaik bagi negara-negara di seluruh dunia. Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut (mampu memproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain) sambil mengimpor komoditas yang mengalami kerugian absolut (memproduksi dengan cara yang kurang efisien). Spesialisasi internasional dari faktor produksi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan produksi dunia yang kemudian akan dimanfaatkan melalui perdagangan antarnegara. Dengan demikian, kebutuhan suatu negara tidak harus didapatkan dengan mengorbankan negara-negara lain, karena setiap negara dapat memenuhi kebutuhannya secara bersamaan.

## 2. Keunggulan Kompetitif

Teori Competitive Advantage atau keunggulan kompetitif adalah teori yang dikembangkan oleh Michael Porter pada Tahun 1985 di mana untuk menjadi lebih unggul di dalam perdagangan maka harus memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor baik itu memiliki kemampuan dalam diferensiasi, pemilihan segmen pasar, mengatur permasalahan hambatan dalam perdagangan, maupun kemampuan lainnya sebagai strategi terbaik untuk mencapai keunggulan dalam perdagangan.

## 3. Keunggulan Komparatif

Ricardo menyatakan bahwa meskipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditas jika dibandingkan dengan negara lain, perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil, membentuk keunggulan komparatif. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar, mengakibatkan kerugian komparatif. Prinsip ini dikenal sebagai hukum keunggulan komparatif. Teori perdagangan internasional membahas dasar-dasar terjadinya perdagangan serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan dan dampak pembatasan perdagangan, termasuk aspek proteksionisme (Salvatore, 1997).

Ide dasar dari perdagangan internasional adalah mengurangi distorsi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk tarif dan non-tarif. Penerapan tarif sebagai pajak menyebabkan biaya perdagangan meningkat. Akibatnya, biaya perdagangan yang meningkat akan menyebabkan kenaikan harga barang impor di negara-negara pengekspor, yang pada gilirannya dapat mengurangi volume perdagangan dengan menetapkan harga terendah untuk barang ekspor.

#### 4. Teori Heckscher-Ohlin

Dalam teorinya terkait dengan dasar terjadinya perdagangan, diasumsikan bahwa negara memiliki perbedaan dalam faktor bawaan, sementara fungsi produksi di semua negara dianggap sama. Dengan menggunakan asumsi ini, disimpulkan bahwa dengan fungsi produksi yang identik dan perbedaan dalam faktor bawaan, suatu negara cenderung untuk mengekspor komoditas yang secara relatif intensif menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan ekonomis. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor komoditas yang memerlukan faktor produksi yang relatif langka dan mahal.

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) memiliki dua kondisi penting sebagai dasar timbulnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori H-O sering disebut sebagai teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Produk yang berbeda membutuhkan jumlah atau proporsi yang berbeda dari faktor produksi, yang disebabkan oleh teknologi yang menentukan cara mengkombinasikan faktor produksi untuk membuat suatu produk (Tambunan, 2004).

Dalam teori H-O, keunggulan komparatif dijelaskan oleh perbedaan kondisi penawaran dalam negeri antar negara. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa negara-negara memiliki preferensi dan teknologi yang sama, kualitas faktor produksi yang sama, menghadapi skala tambahan hasil yang konstan, tetapi sangat berbeda dalam kekayaan alam atau ketersediaan faktor produksi. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam harga relatif faktor produksi antar negara, yang selanjutnya mempengaruhi biaya alternatif barang yang dibuat dan menjadi dasar terjadinya perdagangan antarnegara. Menurut teori H-O, setiap negara akan berspesialisasi dalam jenis barang tertentu, mengekspor barang yang menggunakan bahan baku atau faktor produksi utamanya

melimpah atau harganya murah di negara tersebut, dan mengimpor barang yang menggunakan bahan baku atau faktor produksi utamanya langka atau mahal (Tambunan, 2004).

### **SOAL LATIHAN**

1. Jelaskan definisi dari perdagangan internasional?
2. Jelaskan perubahan bentuk perkembangan perdagangan internasional?
3. Apa yang menjadi dasar atau syarat sehingga perdagangan internasional dapat terjalin?
4. Jelaskan beberapa teori di dalam perdagangan internasional?

# **BAB V**

## **PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN INVESTASI ASING**

### **5.1 Perusahaan Multinasional**

*Multinational Corporation* atau yang dikenal dengan nama perusahaan multinasional merupakan perusahaan lintas batas atau perusahaan transnasional, adalah entitas bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara. Definisi dari perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang signifikan di lebih dari satu negara yang terlibat dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk produksi, pemasaran, dan distribusi di berbagai negara secara global (Adeyeye, 2012). Selain itu, terdapat beberapa definisi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional adalah entitas bisnis yang beroperasi dalam satu negara tetapi memiliki kegiatan produksi dan penjualan di beberapa negara lainnya untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan apabila dengan membangun cabang perusahaan di negara lain sebagai tujuan pasar dianggap lebih menguntungkan (Goldstein, 2007). Perusahaan multinasional umumnya beroperasi di setidaknya lima hingga enam negara di mana perusahaan yang beroperasi di luar negeri dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya sesuai dengan karakteristik pasar yang dituju (Chandler, 2005). Untuk lebih jelasnya, terkait dengan perusahaan multinasional diberikan contoh sebagai berikut.

#### **1) Toyota Motor Corporation**

Toyota Motor Corporation adalah salah satu contoh perusahaan multinasional yang berbasis di Toyota City, Jepang, Perusahaan tersebut merupakan produsen mobil

terbesar di dunia dan memiliki operasi di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka tidak hanya memproduksi dan menjual mobil, tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek industri otomotif, termasuk riset dan pengembangan, produksi komponen, dan layanan purna jual. Keberadaan Toyota secara global mencerminkan sifat multinasionalnya, dengan pabrik dan fasilitas di banyak negara yang melayani pasar lokal dan internasional (Argadinata, 2018).

Ketika berbicara tentang dimensi global Toyota, perusahaan ini memiliki pabrik dan fasilitas di berbagai belahan dunia. Mereka tidak hanya memproduksi mobil untuk pasar domestik di Jepang, tetapi juga memiliki pabrik di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan wilayah lainnya. Hal ini memungkinkan Toyota untuk mendekati pelanggan di berbagai pasar dengan lebih baik dan mengurangi biaya logistik. Dalam kesimpulannya, Toyota Motor Corporation adalah perusahaan multinasional yang memainkan peran integral dalam perkembangan industri otomotif global. Dengan fokus pada inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan, Toyota terus menjadi pemimpin dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan membentuk arah masa depan mobilitas (TMC, 2021).

## 2) Microsoft Corporation

Microsoft Corporation, sebagai perusahaan multinasional teknologi terkemuka yang berkantor pusat di Amerika Serikat, memiliki dampak besar dalam dunia perangkat lunak, komputasi awan, dan teknologi informasi global. Microsoft terkenal karena produk-produk ikoniknya seperti sistem operasi Windows, paket produktivitas Office, dan platform pengembangan perangkat lunak seperti Visual Studio. Dengan kehadiran di lebih dari 190 negara, Microsoft memainkan peran kunci dalam membentuk infrastruktur teknologi informasi di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Meskipun Microsoft telah mencapai kesuksesan global, perusahaan ini juga menghadapi tantangan, termasuk isu-isu privasi data, persaingan ketat di industri teknologi, dan tuntutan etika

teknologi. Melalui pendekatan inovatif, kolaborasi global, dan fokus pada pelanggan, Microsoft terus memainkan peran penting dalam memimpin evolusi teknologi modern (Birkinbine, 2019).

### 3) Adidas AG

Adidas AG adalah perusahaan multinasional asal Jerman, adalah salah satu pemimpin global dalam industri pakaian, alas kaki, dan perlengkapan olahraga. Didirikan pada tahun 1949, Adidas telah tumbuh menjadi merek yang dikenal di seluruh dunia, menggabungkan gaya, inovasi, dan kinerja dalam produk-produknya. Sebagai perusahaan multinasional, Adidas memiliki kehadiran di berbagai pasar internasional dengan toko-toko ritel, penjualan daring, dan mitra distribusi. Merek ikonik tiga garisnya menjadi simbol di dunia olahraga dan gaya hidup, menjadi pilihan utama di kalangan atlet dan konsumen global. Sebagai perusahaan multinasional yang terkenal, Adidas AG juga telah memiliki sejumlah pabrik di berbagai negara di seluruh dunia. Pabrik-pabrik ini berfungsi sebagai pusat produksi untuk berbagai produk Adidas, termasuk alas kaki, pakaian, dan perlengkapan olahraga. Beberapa negara yang memiliki pabrik Adidas yang signifikan termasuk China, Indonesia, Vietnam, India, dan beberapa negara lainnya (Slauson, 2017).

## 5.2 Investasi Asing

Perpindahan modal dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan adalah definisi dari investasi. Umumnya, pemilik modal biasanya berbentuk perusahaan atau pemerintah suatu negara memindahkan modalnya ke berbagai jenis kegiatan ekonomi baik dalam bentuk bisnis maupun kegiatan lainnya untuk meraih keuntungan dari modal yang ditanamkan. Demikian halnya dengan investasi asing, dapat dipahami sebagai upaya perpindahan modal yang dilakukan oleh suatu negara sebagai contoh kepada negara lain

dengan tujuan agar modal yang ditanamkan tersebut dapat meningkat melalui berbagai bentuk kegiatan yang ditawarkan oleh negara penerima modal dengan tujuan modal atau investasi yang didapatkan dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan program yang ditetapkan termasuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara tertentu di mana modal tersebut juga digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan alternatif sehingga penerimaan modal asing melalui investasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pembangunan jangka panjang (Todaro, 2000).

Pemiliki modal selain perusahaan, pemerintah suatu negara juga dapat terlibat dalam investasi di negara lain. Investasi ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga investasi pemerintah atau *sovereign wealth funds* yakni dana investasi yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara dan dikelola untuk menginvestasikan kekayaan nasional. Pemerintah suatu negara dapat menggunakan lembaga investasi untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan dan aset di seluruh dunia termasuk berinvestasi di sektor-sektor strategis, seperti energi, infrastruktur, atau sektor keuangan di negara-negara lain. Tujuannya dapat bervariasi, termasuk diversifikasi portofolio investasi, mencari peluang keuntungan, atau mendukung proyek-proyek strategis. Adapun beberapa contoh negara yang aktif melakukan investasi asing ke negara lain melalui lembaga investasi pemerintah antara lain (Ambarwati, 2011):

1. Norwegia memiliki *Government Pension Fund Global* (GPF), juga dikenal sebagai *Norwegian Oil Fund*. Dengan pendapatan dari industri minyak dan gas, Norway telah menginvestasikan sebagian besar kekayaannya di luar negeri, terutama dalam bentuk ekuitas, obligasi, dan properti.
2. Uni Emirat Arab memiliki beberapa *sovereign wealth funds*, termasuk Abu Dhabi *Investment Authority* (ADIA) dan *Mubadala Investment Company*. ADIA adalah satu di antara beberapa *sovereign wealth fund* terbesar di dunia dan aktif berinvestasi di berbagai sektor di seluruh dunia.

3. Singapura memiliki *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC) dan Temasek Holdings, dua lembaga investasi pemerintah yang aktif di pasar keuangan global. Mereka berfokus pada investasi jangka panjang di berbagai sektor.
4. *Qatar Investment Authority* (QIA) adalah sovereign wealth fund Qatar yang terlibat dalam investasi di seluruh dunia. QIA memiliki portofolio yang mencakup sektor-sektor seperti real estate, infrastruktur, dan keuangan.
5. Tiongkok memiliki China Investment Corporation (CIC) sebagai sovereign wealth fundnya. CIC berfokus pada investasi yang bersifat jangka panjang dan memiliki portofolio yang mencakup berbagai sektor di seluruh dunia.
6. Kuwait *Investment Authority* (KIA) adalah *sovereign wealth fund* Kuwait yang aktif berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan dan sektor-sektor bisnis di luar negeri.

Terdapat dua jenis investasi asing yakni investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung dengan penjelasan masing-masing seperti berikut yakni: 1) Investasi asing langsung merupakan wujud investasi di mana pemilik modal dari satu negara apakah perusahaan atau pemerintah negara itu sendiri memperoleh aset produktif, seperti perusahaan, properti, atau fasilitas produksi di negara lain atau negara tujuan berinvestasi. Kemudian, investasi asing langsung menyertakan kepemilikan langsung atas aset tersebut dan memberikan pemilik modal pengaruh atas investasi yang diberikan misalnya secara sederhana seperti pemilik modal mendirikan cabang perusahaan di luar negeri atau mengakuisisi mayoritas saham perusahaan lokal proses tersebut juga merupakan bagian dari perusahaan multinasional. Adapun alasan perusahaan multinasional terlibat dalam kegiatan investasi asing langsung adalah kepemilikan terhadap pengetahuan produksi atau keterampilan manajerial yang dapat memberikan keuntungan lebih besar jika diterapkan di luar negeri. Dorongan untuk beroperasi di luar negeri dapat

meningkat ketika perusahaan telah menguasai pasar domestik. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan cenderung melakukan penanaman modal asing langsung di negara lain (Salvatore, 1997: 479). Selain untuk mendapatkan keuntungan sejatinya terdapat faktor utama yang menjadi dasar perusahaan multinasional untuk melakukan penanaman modal adalah disebabkan oleh permintaan pasar yang besar, hambatan perdagangan, kebijakan investasi, tingkat upah pekerja, dan biaya transportasi (Carbaugh, 2004); 2) Investasi asing tidak langsung yakni mencakup bentuk investasi di mana pemilik modal tidak memiliki kepemilikan langsung atas aset produktif di negara penerima investasi. Sebaliknya, pemilik modal berpartisipasi melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya sehingga pemilik modal tidak memiliki kendali atau pengaruh langsung terhadap operasi perusahaan yang diinvestasikannya contohnya adalah memiliki portofolio investasi di pasar saham, reksa dana internasional, atau obligasi asing dapat dianggap sebagai bentuk investasi asing tidak langsung.

Investasi asing langsung juga memberikan manfaat kepada penerima modal atau investasi yaitu adanya transfer teknologi dan pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk modal manusia. Investasi asing langsung memberikan transfer pengetahuan penting melalui pelatihan, akuisisi keterampilan, praktek manajemen baru, dan pengaturan organisasi di negara penerima. Manfaat lainnya bagi negara penerima melalui transfer teknologi adalah perubahan mekanisme produksi, desain produk yang lebih baik, peningkatan aktivitas *research and development* perusahaan, peningkatan kualitas output, dan penguatan produktivitas domestik (Campos dan Kinoshita, 2002). Kemajuan teknologi juga membuka peluang untuk menemukan cara baru atau memperbaiki cara-cara lama dalam menangani pekerjaan. Selain itu, investasi asing langsung dapat meningkatkan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan kontribusi keuntungan perusahaan dapat menjadi sumber pendapatan pajak untuk negara penerima.

### **SOAL LATIHAN**

1. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan Multinasional?
2. Sebutkan dan jelaskan syarat suatu perusahaan dapat menjadi perusahaan multinasional?
3. Apakah peran penting dan keterkaitan perusahaan multinasional dalam investasi asing?
4. Jelaskan menurut pendapat anda, apakah investasi asing lebih dominan memberikan dampak negatif atau dampak positif terhadap suatu negara?

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeyeye, Adefolake O. (2012). *Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries*. New York: Cambridge University Press.
- Adumuah, J. H. (2017). *Compare and Contrast Economic Liberalism and Mercantilist Assumption About The Global Political Economy*. University of Ghana, Political Science Department.
- Ambarwati. (2011). Souverinity Wealth Funds (SWFS): Kapitalisme Baru oleh Negara?. *Majalah Ilmiah Ekonomika* 14 (2), 71-79.
- Argadinata, A. G. (2018). Implementasi teori motivasi pada Toyota Motor Company. *Jurnal Manajemen*. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1526>
- Ashworth, L. (2011). Missing Voices: Critical IPE, Disciplinary History and H.N. Brailsford Analysis of The Capitalist International Anarchy. In S. Shields, & dkk (ed.), *Critical International Political Economy*. New York: Palgrave Mc Millan.
- Balam, D. N., & Dilmann, B. (2014). *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Pearson Education .
- Ballinger, C. (2011). *Mercantilism and the Rise of the West: Towards a Geography of Mercantilism*. Retrieved december sunday, 2023, from ssoar.org: <https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-318870>
- Bieler, A., & Morton, A. (2001). The Gordian Knot of Agney Structure in International Relations : A neo-Gramscian Perspective. *European Journal of International Relations*,, 7(1), 5-35.
- Birkinbine, B. J. (2019). Microsoft Corporation. In *Global Media Giants*. <https://doi.org/10.4324/9781315682334-24>

- Campos, N.F. and Kinoshita, Y. (2002). Foreign Direct Investment as Technology Transferred: Some Panel Evidence from the Transition Economies.
- Carbaugh, R. (2004). International Economics. 9th Ed . USA: Thomson.
- Chandler, Mazlish. (2005). Leviathans: Multinational Corporations and The New Global History. New York: Cambridge University Press.
- Cohn, T. (2005). *Global Political Economy Theory and Practice*. London: Pearson.
- Cox, R. (1981). Social Forces, States and Word Orders : Beyond International Relations Theory',. *Millenium: Journal of International Studies*, 10(2), 126-55.
- Cox, R. (1995). Critical Political Economy. In H. B, *International Political Economy : Understanding Global Disorder* . London: Zed Books.
- David N. Balaam & Dillman, B. (2018). Introduction to International Political Economy. New York: Routledge.
- Doyle, M. w. (1997). The Ways of War and Peace. New York: W.W. Norton.
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama. (2021). Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Feriyanto, Andri. 2015. Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Frederic, J., & Larsen , N. (1988). *The Ideologies of Theory : Esay 1971-1986*. New York : Routledge.
- Gill, S. (. (1995). *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton: Princeton University Press.

- Gilpin, Robert. (2008). *The Study of International Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Goldstein, Andrea. (2007). *Multinational Companies from Emerging Economies*. New York: Palgrave Macmillan
- Halwani, R. Hendra. (2000). *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Makro dan Mikro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Henk, O. (2000). *Transnaional Historical Materialism*. In R. Palan (Ed.), *Global Political Economy Contemporary Theories*. Routledge.
- Hilmu Rahman Ibrahim, Hamka Halkam. (2021). *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Jackson, R., Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jackson, R., & Sorensen, R. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keynes, J. (1963). *The End of LaissezFaire," in Essays in Persuasion*. New York: W.W. Norton.
- Keynes, J. M. (1991). *Keynes, Lucas, dan Ilmiah Kemajuan*. (M. Blaug, Ed.) Brookfield, vt. :: Edward Elgar.
- Kindleberger, C. (1970). *The Economics of International Politics and The Politics of International Economics*. New York: Basic Books.
- Maiwan, M. (n.d.). *Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional dalam Perbincangan : Aliran dan Pandangan*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 109-125.
- Mas'oed, Mohtar. (2003). *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masrurroh, S. (2017, Oktober). *Kepentingan Amerika Serikat Menolak Impor CPO (Crude Palm Oil) dari Indonesia Tahun 2022*. *JOM FISIP*, 4(2), 1-13.

- Mendonca, F., & Demuner, D. (2016). The Neo-Gramscian School to International Political Economy, Passive Revolution and Globalization. *Brazilian Political Science Review*, 10(3).
- Miller, Raymond C., 2008. International Political Economy: Contrasting World Views. New York: Routledge.
- Mokyr, J. (May 2003). *Mercantilism, the Enlightenment, and the Industrial Revolution*. Stockholm.
- Morton, A. (2007). Disputing the geopolitics of the states system and Global Capitalism. *Cambridge Review of International Affairs*, 20(4), 599-617.
- Oatley, Thomas. (2018). International Political Economy 6th Edition. New York: Routledge.
- Reinert, E. S. (2004). How Rich Nations got Rich: Essays in the History of Economic. 01. Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
- Ricardo, D. (1973). *The Principle Of Political Economy And Taxation*. London: Dent.
- Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 641-649.
- Ryan , A. (1989). John Stuart Mill. In J. Eatwell, M. Murray , & P. Newman, *The Invisible Hand : The New Palgrave* . New york: W.W. Norton.
- Tambunan, Tulus. (2004). Globalisasi dan Perdagangan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tampubolon, E., Suria Alamsyah Putra, Pantas, H. (2022). *Ekonomi Politik (Dalam Perspektik Manajemen)*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Todaro, M.P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga

- Toyota Motor Corporation. (2021). Vision & Philosophy. In *Toyota Motor Corporation Official Global Website*.
- Salvatore, Dominick. (1997). *Ekonomi Internasional Edisi Kelima*, Jakarta: Erlangga.
- Slauson, J. (2017). Adidas. In *The Bloomsbury Encyclopedia of Design*. <https://doi.org/10.5040/9781472596178-bed-a014>
- Wallerstein, I. (1984). *The Politics of Capitalist World Economy*. Cambridge: Cambridge Press.
- Widodo, E. (2017). Ideologi Utama dalam Ekonomi Politik Global. *Majalah Manajemen dan Bisni Ganesha*, 1(1).
- Widodo, E. S. (2017, April). Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik. *Majalah Manajemen dan Bisnis Ganesha*, 1(1).

## BIODATA PENULIS



**Andi Ismira, M.A.**

Dosen Program Studi Hubungan Internasional  
Universitas Sulawesi Barat

Lahir di Ujung Pandang, 09 Maret 1989. Menyelesaikan Program S1 nya Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2010 serta Magister of Arts di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Pernah mengajar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015, dan Menjadi Dosen Tetap sejak tahun 2017 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Sejak 2016 penulis aktif menulis jurnal ilmiah dan telah melahirkan beberapa publikasi buku. Selain menjadi dosen, penulis juga Aktif pada beberapa forum dan perkumpulan nasional, salah satunya adalah dengan menjadi pengurus pada perkumpulan Rumah Produktif Indonesia, menjadi anggota pada Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia dan juga pernah menjadi anggota Asosiasi Peneliti Perdamaian Asia Pasifik (APPRA) pada tahun 2019-2021.

## **BIODATA PENULIS**



**Riady Ibnu Khaldun**

Dosen Program Studi Hubungan Internasional  
FISIP Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir pada Tahun 1992 di Ujung Pandang telah menyelesaikan Studi S1 di Program Studi Hubungan Internasional President University Tahun 2013, Studi S2 pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada Tahun 2015, dan S3 di Universitas Tadulako Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2018. Beberapa publikasi yang telah dihasilkan sejalan dengan bidang ilmu yang dikaji yakni Ekonomi Politik Global adalah: 1) Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Indonesia di Pasar Global (2017); 2) Globalisasi, Ancaman dan Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik terhadap Serangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (2020); 3) Global Trade Restriction During Covid-19 Pandemic (2021); 4) Peran Penting Pemerintah Indonesia untuk Memanfaatkan kembali Kesempatan dalam ACFTA (2022); 5) Dinamika Ekonomi Politik ASEAN: Optimalisasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas (2022); dan 6) Analisis Perdagangan Internasional Studi Kasus Perkembangan Ekspor Komoditas Lemak dan Minyak Hewani atau Nabati (Kode HS 1518) Provinsi Sulawesi Barat (2023).